

**ANALISIS STRATEGIK PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS
KETENAGAKERJAAN UNTUK TENAGAKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
(Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

MISBAHUL HASAN
NIM. 083 143 188

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I
NIP. 19690706 200604 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2019**

**ANALISIS STRATEGIK PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS
KETENAGAKERJAAN UNTUK TENAGAKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH (BPU)
(Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Misbahul Faza
NIM : 083143188

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I
NIP. 19690706 200604 1 001

**ANALISIS STRATEGIK PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS
KETENAGAKERJAAN UNTUK TENAGAKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
(Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember)**

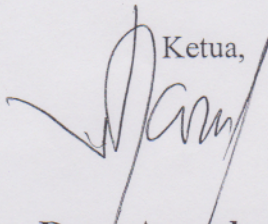
SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 27 Mei 2019

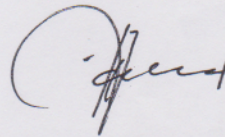
Tim Penguji

Ketua,


Daru Anondo, S.E, M.Si

NIP. 19750303 200901 1 009

Sekretaris,

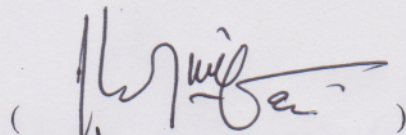


Suprianik, SE., M.Si

NUP. 201603136

Anggota:

1. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si

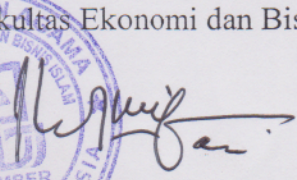
()

2. Dr. Abdul Wadud Nafis, L.C., M.E.I

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الاثم والعدون

*Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*

*(Qs. Al-Maidah 2)**

SAPU LIDI

Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh

IAIN JEMBER

* Al-Qur'an, 7:2

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah Memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya Misti Bapak saya Hasbullah yang senantiasa memberikan dukungan serta mengiringi langkah ini dengan do'a dan kasih sayangnya, sebagai motivator terbesar membuat tetap bertahan disaat ingin menyerah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua ke dua saya Abah Muhlisin dan Ummi Uslifatil Jannah
3. Guru-guru dan dosen saya mulai dari TK, SD, SMP, SMK dan Pondok Tercinta saya PPIS dan Zainul Hasan Genggong sampai sekarang di IAIN Jember
4. Kakak sekandung saya Ach. Daufiri dan Zulihatini dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan do'a atas kelancaran skripsi ini.
5. Istri saya Konita Nur Indah Sari yang seringkali menemani dalam penyusunan skripsi ini, dan selalu mengiringi do'a dalam tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Sodara terbaik Keluarga Besar BOLO SEWU, dan PMII IAIN Jember dan Wabil Khusus sodara sejuang saya, Dulur Moch. Nafis Madani, Bolo Afnas, Sahabat Dulal, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan support saat suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman kelas J4 Perbankan Syari'ah, Seperjuangan angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk selalu optimis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dan kepada seluruh pihak yang turut membantu dan memberi dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat, dan taufik serta hidayah-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Strategik Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Tenagakerja Bukan Penerima Upah (Bpu)** (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember)

Dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Amin. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Peneliti menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'I, SE, M,Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Nurul Setianingrum, SE,MM selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIN Jember.

5. Kh. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dewan penguji .
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
8. Seluruh Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu dan memberikan data untuk melengkapi skripsi dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain doa dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini sempurna.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat dan barokah dunia akhira tbagi semua pihak.

Jember, 20 April 2019

Penulis

ABSTRAK

Misbahul Hasan, Dr. Abdul Wadud Nafis, LC., M.E.I. 2019: *Analisis strategik program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) (studi kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember).*

Pada umumnya perusahaan asuransi memiliki tujuan untuk mengalihkan risiko dari suatu pihak tertanggung kepada pihak penanggung melalui program yang diciptakan, program asuransi memiliki sebuah rencana awal yang didalamnya terdapat tujuan dari program tersebut, sasaran pemasaran, serta target yang ingin dicapai. Salah satu asuransi yang ada di Indonesia adalah BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan menanggung risiko-risiko yang kemungkinan dialami pekerja Indonesia melalui program jaminan sosial, pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menciptakan program jaminan sosial untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji rencana awal dari program jaminan sosial untuk tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Fokus penelitian ini diantaranya: 1) apa tujuan dibentuknya program jaminan sosial untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)? 2) Siapa saja sasaran pemasaran dari program jaminan sosial untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)? 3) Apa target yang ingin dicapai dari program jaminan sosial untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui tujuan dibentuknya program jaminan sosial untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). 2) Untuk mengetahui sasaran pemasaran dari program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU). 3) Mengetahui target yang ingin dicapai dari program jaminan sosial untuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, dengan menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan, lokasi penelitian di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik: 1). Observasi, 2). Wawancara, 3). Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif* yaitu memberikan gambaran mengenai Analisis strategik program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU), dan apabila data tersebut sudah terkumpul secara keseluruhan maka kemudian peneliti melakukan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Tujuan dibentuknya program jaminan sosial tenaga kerja bukan penerima upah adalah untuk mencapai perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia yakni lewat program jaminan sosial untuk tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU). *Kedua*, Sasaran pemasaran untuk tenaga kerja bukan penerima upah adalah, setiap pekerja-pekerja mandiri yang tidak termasuk kedalam kategori pekerja Penerima Upah, dan di perjelas dalam Permenaker No.1 tahun 2016 pasal 4 ayat 1, dengan pemaksimalan umur 60 tahun, serta estimasi penghasilan sebesar Rp. 100.000,-/Bulan. *Ketiga*, Target yang ingin di capai meliputi, Target produk yang di pasarkan, Target demografi, berupa target dengan minimal estimasi penghasilan yakni 1juta, dan usia yang maksimal pendaftaran 60 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dan target jumlah konsumen.

ABSTRACT

Misbahul Hasan, Dr. Abdul Wadud Nafis, LC., M.E.I. 2019: *Strategic analysis of the BPJS Employment Social Security program for Non Wage Recipients (BPU) workers (case study of the Jember Branch BPJS Employment).*

In general, insurance companies have a goal to transfer the risk from an insured party to the insurer through the program created, the insurance program has an initial plan in which there are objectives of the program, marketing objectives, and targets to be achieved. One of the existing insurance in Indonesia is BPJS Employment which aims to bear the risks that may be experienced by Indonesian workers through social security programs, in 2015 BPJS Employment created a social security program for Non Wage Recipients (BPU). Therefore the researcher is interested in reviewing the initial plan of the social security program for Non Wage Recipients (BPU) labor

The focus of this study includes: 1) what is the purpose of establishing a social security program for Non-Wage Recipients (BPU)? 2) Who are the marketing objectives of the social security program for Non-Wage Recipients (BPU)? 3) What are the targets to be achieved from the social security program for Non-Wage Recipients (BPU)?

The objectives of this study are: 1) Knowing the purpose of the establishment of a social security program for Non Wage Recipients (BPU). 2) To find out the marketing objectives of the social security program for non-wage workers (BPU). 3) Knowing the targets to be achieved from the social security program for non-wage workers (BPU).

This research uses descriptive qualitative research method with the type of field research, with emphasis on the results of data collection from informants, research locations at the Jember Branch BPJS Employment office, as for data collection techniques in this study using techniques: 1). Observation, 2). Interview, 3). Documentation. Analysis of data in this study using descriptive data analysis is to provide an overview of the Strategic Analysis of BPJS Employment Social Security program for non-wage workers (BPU), and if the data has been collected in its entirety then the researcher conducts data analysis.

Based on the results of the study it can be concluded that first, the purpose of the establishment of non-wage labor recipient social security programs is to achieve protection for all Indonesian workers, namely through social security programs for Non Wage Recipients (BPU) workers. Second, the marketing target for non-wage workers is, for each self-employed worker not included in the Wage Recipient employee category, and explained in PERMENAKER Number 1 of 2016 article 4 paragraph 1, with an maximization of 60 years of age, and estimated income of Rp. 100,000, - / Month. Third, the targets to be achieved include, Target products that are marketed, Demographic targets, in the form of targets with a minimum estimated income of 1 million, and age of 60 years registration, with male and female sex, and target number of consumers.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-tahap Penelitian.....	53

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian.....	55
B. Penyajian data dan analisis Data.....	76
C. Pembahasan Temuan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal
G.1	Tabel Penelitian Terdahulu	26
A.2	Tabel Penetapan Iuran BPU	71



DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Hal
A.1	Struktur Organisasi Batik Sumbersari	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial, hak jaminan sosial adalah segenap perlindungan yang diberikan oleh masyarakat melalui suatu lembaga untuk melindungi anggotanya dari risiko-risiko sosial ekonomi dalam dunia kerja.¹

Karena itu sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus di selenggarakan oleh semua negara, Dari itu di negara Indonesia menerapkan kepedulian bagi hakikat hak asasi manusia, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 41 ayat 1 yang berbunyi: *“setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang di butuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”*.²

Kemudian pemerintah melimpahkan amanat kepada PT. Jamsostek (Persero) untuk mengambil tanggung jawab dalam jaminan sosial untuk

¹Zaeni asyhadie, *Aspek-Aspek hukum jaminan sosial tenagakerja Indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),20

² ibid,22

masyarakat, namun sesuai UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) PT. Jamsotek (persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 januari 2014.³

BPJS ketenagakerjaan adalah lembaga asuransi jaminan sosial khusus untuk tenaga kerja, penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai kondisi kemampuan keuangan negara.⁴

Pada dasarnya tujuan utama sebuah perusahaan, baik perusahaan di bidang perdagangan, bidang jasa, ataupun bidang lainnya pada umumnya memiliki tujuan yang sama yakni memenuhi kebutuhan konsumen disamping itu juga mendapatkan laba guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas usaha bisa dijaga untuk mendorong dan menciptakan kondisi usaha yang kondusif.⁵

Perusahaan asuransi menjalankan kegiataanya dalam bidang jasa dengan memberikan jaminan kepada nasabah/peserta bila mengalami kerugian sesuai dengan perjanjian, dan perusahaan asuransi dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang memadai guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar bersedia menyimpan dananya melalui jasa asuransi, fungsi utama dari perusahaan asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko, yakni pengalihan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain

³https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan

⁴ Zaeni asyhadie, *Aspek-Aspek hukum jaminan sosial tenagakerja Indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),3.

⁵ A. subandi, *kekuatan sebenarnya dari audit pemasaran*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005),71.

(penanggung), sebagai imbalannya penanggung membayar premi sebagai kesepakatan kepada pihak penanggung, kemudian premi dari pihak tertanggung di kelola untuk mendapatkan hasil dan kemudian di bagi sesuai kesepakatan, dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing, perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi sesuai dengan nilai risiko yang dihadapi, semakin besar risiko maka semakin besar pula premi yang harus dibayar dan sebaliknya.⁶

Menurut Abbas Salim dalam dalam buku asuransi & manajemen risiko, Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian kerugian besar yang belum pasti.⁷

Kepedulian pemerintah akan tenaga kerja sangatlah besar, peraturan-peraturan yang memihak terhadap tenaga kerja sudah banyak yang dibuat, salah satunya peraturan akan kesejahteraan tenaga kerja baik sosial ataupun ekonomi yang diamanatkan kepada lembaga asuransi BPJS Ketenagakerjaan, demi terlindunginya para pekerja dari risiko-risiko pekerjaan yang mungkin terjadi, dan terjaminnya sosial ekonomi tenaga kerja beserta keluarganya dikala terjadi sesuatu kepada tenagakerja yang menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh kecelakaan kerja yang berakibat kematian atau cacat total, BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menghendel seluruh pekerja baik formal maupun

⁶ Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2012), 261

⁷ Abbas salim, *asuransi & manajemn risiko*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),1.

informal. BPJS Ketenagakerjaan memiliki dasar hukum sebagai berikut:1). UUD 1945 pasal 28H bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, 2). UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, 3). UU No.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial.⁸

Dalam pemasarannya BPJS ketenagakerjaan fokus terhadap tenaga kerja baik yang penerima upah (PU) atau formal maupun yang bukan penerima upah (BPU) atau informal, penerima upah adalah pekerja yang bukan mandiri atau pekerja yang bekerja di perusahaan (karyawan) atau setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.⁹

Sebuah perusahaan wajib mengikut sertakan karyawannya terhadap program-program asuransi BPJS ketenagakerjaan sebagai mana yang di tegaskan dalam UU no 24 tahun 2011 pasal 14 yang berbunyi “*setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial ke tenaga kerjaan*”, pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “*pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagi peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti*“, apabila suatu perusahaan tidak mengikuti aturan tersebut maka perusahaan yang bersangkutan akan di kenakan sanksi yang di tegaskan dalam UU no 24 tahun 2011 pasal 17 ayat 1- 5.¹⁰

⁸ PP, UU No. 40 tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁹ www.bpjsketenagakerjaan.go.id

¹⁰ www.bpn.go.id

Ada 4 manfaat yang dapat diperoleh dari pekerja PU di antaranya, Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa di ambil manfaatnya ketika pekerja sudah berhenti bekerja, dan premi yang harus di bayar 5,7% dari total upah yang di bagi 3,7% di tanggung perusahaan dan 2% di tanggung dari si pekerja, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang bermanfaat untuk pekerja jika mengalami kecelakaan kerja dengan biaya perawatan ditanggung pihak BPJS dan premi yang harus di bayar sebesar 0,24%-1,74% dari total gaji pekerja sesuai dengan tingkat risiko, dan dibayar sepenuhnya oleh pihak perusahaan, Jaminan Kematian (JKM) yang diperuntukkan bagi ahli waris peserta program BPJS Ketenagakerjaa yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, adapun premi yang harus dibayar adalah 0,3% dari total upah setiap bulannya, Jaminan Pensiun (JP) yang di peruntukkan untuk pekerja ketika memasuki usia pensiun yakni 56 tahun dengan tanggungan premi yang harus di bayar 4% dari total upah satu bulan dengan pembagian 2% di tanggung oleh perusahaan 2% di tanggung oleh pekerja.¹¹

Adapun pekerja yang bukan penerima upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi, pemberi kerja atau pekerja mandiri atau pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah. Dari pekerja bukan penerima upah ini bisa memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta

¹¹ Sumber data: brosur program BPJS Ketenagakerjaan untuk tenagakerja Penerima Upah

dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk ikut serta dalam program BPJS ketenagakerjaan.¹²

Program BPU baru di luncurkan tahun 2016, dengan beberapa program yang hampir sama dengan program PU, namun tidak ada program pensiun untuk pekerja Bukan penerima upah, hanya ada tiga program yang bisa dinikmati manfaat peserta bukan penerima upah yakni, program jaminan kecelakaan kerja dengan premi 1% dari penghasilan perbulan, jaminan kematian senilai Rp 6.800, jaminan hari tua dengan tanggungan premi 2% dari penghasilan perbulan pekerja.¹³

Sebagaimana suatu program dari sebuah perusahaan sebelum di luncurkan perlu perencanaan yang matang terlebih dahulu tentang program yang ingin diluncurkan, agar semua terkonsep dengan rapi dengan meminimalisir risiko yang akan terjadi, dalam sebuah perencanaan produk baru haruslah ditetapkan suatu tujuan yang pasti, sehingga sasaran-sasaran, target yang ingin tercapai bisa diwujudkan dengan persaingan yang ketat taktik yang tersusun, perencanaan yang dirancang haruslah jelas terarah kepada suatu sasaran, target yang ingin di capai.¹⁴

Dalam hal ini program BPU yang baru disahkan 2015 Ketenagakerjaan, memiliki perencanaan yang matang beserta tujuan tujuan yang ingin dicapai, serta target dari program BPU tersebut, dari itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam, tentang tujuan di bentuknya program jaminan sosial untuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) dengan terfokus pada

¹² Andika wijaya, *Hukum jaminan sosial Indonesia*(Jakarta:Sinar grafika, 2018),25

¹³Sumber data: Brosur program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja Bukan Penerima Upah

¹⁴ Hadari nawawi, *manajemen strategik* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 210

tujuan tujuan dibentuknya program tersebut serta sasaran pemasaran dan target yang ingin dicapai dari program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU), semua titik fokus tersebut tercover dalam judul, *Analisis strategik program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) (Studi kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember)*

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat Tanya.¹⁵

Adapun masalah-masalah dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Apa tujuan di bentuknya program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah(BPU)
2. Siapa saja sasaran pemasaran dari program jamina sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU)
3. Apa target yang ingin di capai dari program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU)

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.¹⁶

Dari itu berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tujuan dibentuknya program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU)
2. Untuk mengetahui sasaran pemasaran dari program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU)
3. Mengetahui target yang ingin dicapai dari program jaminan sosial untuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁷

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan, kependidikan, khususnya mengenai lembaga keuangan non bank tentang asuransi BPJS Ketenagakerjaan, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan

¹⁶Tim penyusun, *Pedoman karya ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹⁷ Ibid.,45

mengambil kaneah penelitian yang berbeda dengan sampel penelitian yang lebih banyak

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambahkan wawasan pengetahuan tentang asuransi BPJS ketenagakerjaan khususnya program yang dikususkan untuk pekerja bukan penerima upah serta mengembangkan wawasan keilmuan dibidang penelitian dan karya ilmiah.

b. Bagi instansi BPJS Ketenagakerjaan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam program jaminan sosial kusus tenaga kerja bukan penerima upah hingga bisa mencapai target sasaran pemasaran dengan tujuan yang di rencanakan pada awalnya.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini di harapkan bisa untuk menjadi bahan pemahaman tentang asuransi BPJS yang tidak hanya beroperasi dibidang kesehatan saja namun juga ketenagakerjaan yang juga mengadakan program bagi pekerja informal atau bukan penerima upah

d. Bagi Kampus IAIN Jember

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi kampus IAIN Jember serta sebagai literatur tambahan bagi mahasiswa yang hendak menindaklanjuti penelitian tentang asuransi ketenagakerjaan

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁸

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judu maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat pada judul tersebut:

1. Strategik

Dalam membahas perkataan “strategik” sulit untuk di bantah bahwa penggunaannya diawali atau bersumber dari dan populer dilingkungan militer, dilingkungan tersebut penggunaannya lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai tugas dari seorang komandan dalam menghadapi musuh,yang bertanggung jawab mengatur cara, merencanakan taktik sebagai strategi peperangan, disamping itu secara lebih bebas perkataan strategi sebagai teknik dan taktik dapat diartikan

¹⁸Tim penyusun, *Pedoman karya ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

juga sebagai “kiat” seorang komandan untuk memenangkan peperangan yang menjadi tujuan pertama.¹⁹

Menurut auliya dalam artikelnya strategik adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mendapatkan tujuan tertentu yang umumnya adalah kemenangan, pengertian secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang befokus pada tujuan jangka panjangn organisasi, disertai penyusunan suatau cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa di capai.²⁰

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kata “strategik” adalah kata yang lebih mengarah kepada suatu perencanaan dasar yang berkaitan dengan tujuan tujuan atas sebuah perencanaan tersebut dan juga sasaran dari sebuah rencana yang di buat tersebut.

2. Jaminan Sosial

Jaminan Sosial adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat pada umumnya, dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang di singkat UU SJSN memberi pengertian tentang sistem jaminan sosial nasional sebagai suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Adapun pengertian yuridis atas jaminan sosial sebagai ketentuan pasal 1 UU SJSN adalah sebagai salah satu

¹⁹ Hadari nawawi, *manajemen strategik* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 147.

²⁰ Auliya, “Pengertian strategik”, <https://tugasmagic.wordpress.com/category/manajemen-strategik/> (25 februari 2010). Diakses 5 November 2018

bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.²¹

3. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah badan penyelenggara jaminan sosial milik negara yang diperuntukkan untuk para pekerja di Indonesia, yang awal mulanya adalah JAMSOSTEK lalu direnovasi menjadi sebuah badan yang lebih berperan aktif dalam perlindungan tenaga kerja yang ada di Indonesia.²²

Dalam dunia kerja BPJS ketenagakerjaan mengategorikan pekerja kepada 2 kelompok yakni pekerja penerima upah (PU) dan pekerja bukan penerima upah (BPU), 2 kelompok pekerja tersebut disediakan jaminan sosial oleh BPJS ketenagakerjaan dengan program-program antisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pekerja diwaktu menjalankan pekerjaan, menuju tempat kerja dan saat diperjalanan sepulang kerja.

Pekerja penerima upah (PU) adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, Peserta pekerja penerima upah dapat mengikuti 4 program manfaat secara bertahap yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan peserta, pembayaran premi disesuaikan dengan tingkat risiko pekerja.²³

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk

²¹ Andika wijaya, *Hukum jaminan sosial Indonesia*(Jakarta:Sinar grafika, 2018),1

²² ibid, 4

²³ Sumber, Brosur Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Penerima Upah (PU)

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya, peserta pekerja bukan penerima upah (BPU) dapat mengikuti 3 program manfaat jaminan sosial sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta.²⁴

Adapun program program yang di sediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori 2 pekerja di atas adalah:

a. Jamina Kecelakaan Kerja (JKK)

Yakni sebuah program yang wajib bagi pekerja penerima upah untuk mengikutinya, dengan manfaat pelimpahan tanggung jawab dari perusahaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenaga kerja selaku sebuah lembaga asuransi sosial apa bila pekerja mengalami kecelakaan diwaktu kerja, sedang dalam perjalanan menuju kerja ataupun dalam perjalanan pulang dari kerja.²⁵

b. Jaminan kematian (JKM)

Adalah sebuah bentuk jaminan kepada pekerja apabila pekerja meninggal dunia diluar hubungan kerja, tujuannya adalah sebagai santunan kesejahteraan bagi ahli waris

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebuah program simpanan bertahap untuk perkerja dari pekerja dan perusahaan yang bisa di cairkan oleh peserta/nasabah BPJS Ketenagakerjaan ketika sudah tidak berkerja lagi seperti Berhentinya pekerja disebabkan PHK, Putusnya kontrak kerja, pekerja memasuki usia pensiun, atau pekerja meninggal

²⁴ Sumber, Brosur program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

²⁵ ibid

dunia dengan syarat jarak dari penonaktifan kartu BPJS ketenagakerjaan selama 1 bulan.²⁶

d. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun hanya di peruntukkan bagi pekerja Penerima Upah dengan persyaratan menjadi peserta selama 10 tahun.

Ke empat program tersebut bisa diikuti oleh Pekerja Penerima Upah (PU) secara bertahap, namun untuk Pekerja Bukan Penerima Upah, Jaminan pensiun masih belum di sediakan dengan alasan kemampuan yang hanya di bayar perorangan.

Dari pemaparan definisi istilah tersebut pada dasarnya peneliti tertarik untuk mendalami tentang perencanaan dibentuknya program baru dari BPJS Ketenagakerjaan yang mengarah kepada tujuan tujuan, beserta sasaran pemasaran dan target yang ingin dicapai dari program untuk tenaga kerja bukan penerima upah, beserta target-target yang ingin dicapai.²⁷

4. Bukan Penerima Upah (BPU)

adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi, pemberi kerja atau pekerja mandiri atau pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah. Dari pekerja bukan penerima upah ini bisa memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta dan tidak

²⁶ Sumber, Brosur Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Penerima Upah (PU)

²⁷ ibid

ada paksaan dari pihak manapun untuk ikut serta dalam program BPJS ketenagakerjaan.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

BAB I : Pendahuluan pada Bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga tentang sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan: Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu yang menjadi salah satu referensi peneliti, kemudian pada kajian teori di jelaskan tentang pembahasan teori.

BAB III: Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Fungsi dari bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian.

²⁸ www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BAB IV: Penyajian data dan analisis data berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang diperoleh dilapangan.

BAB V : PENUTUP Pembahasan pada bab terakhir ini adalah menarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terdahulu pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya yaitu:

- a. Skripsi Sieven alfian, 2012, yang berjudul *analisis prosedur klaim pencairan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Jamsostek Cabang Pasuruan*, Fakultas Bisnis dan Ekonomi ,

Universitas Surabaya, fokus masalah pada penelitian ini adalah, 1.

Bagaimana prosedur Klaim Pencairan Program Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK) di BPJS ? 2. Apa kendala dalam Klaim Pencairan

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS ? 3. Bagaimana

upaya mempermudah kendala dalam klaim pencairan Program

Jaminan Kecelekaan Kerja di BPJS ? Metode penelitian yang di

gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan

deskriptif.

Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang pencairan

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang mana di peruntukkan kepada

pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dari prosedur hingga

kendala dalam klaim dan juga cara mempermudah kendala tersebut, dalam kategori pekerja umum baik PU dan BPU

Sedangkan peneliti mendalami tentang sebuah tujuan, hingga pemasaran beserta target dalam kategori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

- b. Skripsi Wilfridus Delfri Otemusu, 2014, yang berjudul “*Analisis strategi pemasaran produk asuransi kesehatan tenaga kerja pada PT. Jamsostek (persero) Cabang Bogor I, Jawa Barat*” Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan PT . JAMSOSTEK Cabang Bogor I saat ini ? 2. Faktor-faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) apa saja yang mempengaruhi strategi pemasaran PT JAMSOSTEK Cabang Bogor I ? 3. Alternatif strategi pemasaran apakah yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan keadaan PT JAMSOSTEK Cabang Bogor I ? metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.²⁹

Isi dari penelitian terdahulu fokus pada pemasaran dengan melihat faktor internal dan eksternal

Sedangkan peneliti membahas tentang permasalahan kategori ncaan pembentukan program yang baru dibentuk.

²⁹ Wilfridus Delfri Otemusu, Analisis strategi pemasaran produk asuransi kesehatan tenaga kerja pada PT. Jamsostek (persero) Cabang Bogor I, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2014)

- c. Skripsi Raden Dendhy Yudha Prawira, 2015, yang berjudul, “*Strategi badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di kota tangerang*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, fokus penelitian pada skripsi ini adalah, Bagaimana strategi Badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di kota tangerang ? metode penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian terdahulu membahas tentang strategi BPJS Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan buruh melalui program program yang sudah ada untuk tenaga kerja penerima upah.

Sedangkan peneliti membahas tentang perencanaan dasar untuk mencapai kesejahteraan buruh untuk yang bukan penerima upah.³⁰

- d. Skripsi, Elias samba rufus, 2015, yang berjudul, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tekhniktama industri (YPTI) di Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, fokus masalah pada penelitian terdahulu ini adalah, 1. Bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tekhniktama industri (YPTI) di Yogyakarta ? 2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di PT. Yogya presisi tekhniktama industri (YPTI) di Yogyakarta ? 3. Apa manfaat Jaminan Hari Tua untuk Karyawan di di PT. Yogya presisi

³⁰ Raden Dendhy Yudha Prawira, 2015 Strategi badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di kota tangerang, (Serang: Universitas Sultan Ageng, 2015)

tekniktama industri (YPTI) di Yogyakarta ? metode penelitian dalam penelitian terdahulu ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Dalam pembahasan di penelitian terdahulu ini adalah penerapan program Jaminan Hari Tua (JHT) di di PT. Yogya presisi tekniktama industri (YPTI) di Yogyakarta, beserta penjelasan tentang manfaat yang bisa di rasakan oleh pekerja di di PT. Yogya presisi tekniktama industri (YPTI) di Yogyakarta, objek utama dalam penelitian ini yakni PT. Yogya presisi tekniktama industri (YPTI) di Yogyakarta

Sedangkan peneliti dalam skripsinya lebih fokus pada Objek BPJS selaku penyelenggara Jaminan Hari Tua (JHT) dan juga kusus kepada pekerja non kariawan atau pekerja yang tidak menerima upah dari pekerjaannya terhdap orang lain.³¹

- e. Skripsi, Nurul Anggraini 2016, yang berjudul, “*Pengaruh agen prisai dalam meningkatkan jumlah peserta program BPJS Ketenagakerjaan Cabang 2 Pasuruan*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islma, Institu Agama Islam Negri Jember.

Fokus penelitian pada skripsi ini Adalah, 1. Bagaimana pengaruh Agen prisai dalam meningkatkan jumlah peserta Program

³¹ Elias samba rufus, Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tekniktama industri (YPTI) di Yogyakarta, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)

BPJS Ketenagakerjaan Cabang 2 pasuruan? metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.³²

Isi dari penelitian terdahulu adalah mencari seberapa besar pengaruh agen prisai dalam meningkatkan jumlah peserta di BPJS Keteagakerjaa Cabang Pasuruan

Sedangkan peneliti lebih kepada perencanaan pada suatu pengembangan produk untuk kategori pekerja yang baru di bentuk pada BPJS Ketenagakerjaan.

- f. Skripsi, Firman syah, 2016, yang berjudul *Pengukuran risiko asuransi dalam Penentuan Pembayaran premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah, Pembayaran premi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan tidaklah sama per tenagakerja, ada tolak ukur risiko yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan besaran peremi yang harus di bayar oleh Perusahaan, dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana mengukur risiko yang kemungkinan dialami oleh pekerja untuk menentukan besaran premi yang harus dibayar oleh pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan ? Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif

³² Nurul Angraini 2016, ” Pengaruh agen prisai dalam meningkatkan jumlah peserta program BPJS Ketenagakerjaan Cabang 2 Pasuruan” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jember: Institut Agama Islam Negri Jember, 2016)

Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang tolak ukur risiko untuk menetapkan pembayaran premi produk JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, mengingat pembayaran premi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja tidaklah sama, Fokusnya terhadap salah satu program yakni JKK

Sedangkan peneliti lebih menfokuskan pembahasan pada Rencana pembentukan yang juga berkaitan dengan sasaran pemasaran dan target yang ingin di capai pada program yang di sediakan kepada Pekerja Bukan Penerima Upah.³³

- g. Skripsi, Hasan habiburrohman, 2016, yang berjudul *Implementasi Pelayanan Prima dan Strategi Promosi dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabaang Gresik*, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Surabaya, fokus masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah implementasi pelayanan prima dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabaang Gresik? 2. Bagaimanakah strategi promosi program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabaang Gresik? 3. Apa kendala strategi promosi dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabaang Gresik? 4. Bagaimana solusi untuk menangani kendala strategi promosi program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabaang

³³ Firman syah, Pengukuran risiko asuransi dalam Penentuan Pembayaran premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2016)

Gresik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif pendekatan deskriptif.³⁴

Pembahasan dalam penelitian Hasan habiburrohman mengenai excelent service atau pelayanan terhadap nasabah/peserta dan juga promosi program jaminan sosial di BPJS Ketengakerjaan,

Sedangkan peneliti mefokuskan pada Strategik (perencanaan) yang mengacu kepada sebuah tujuan dibentuknya kategori pekerja dengan program-programnya beserta pemasarannya.

- h. Skripsi Hesti Novianisa, 2017, yang berjudul "*Analisis strategi pemasaran pada usaha oleh oleh menggunakan metode swot dan quantitative strategic planning matrix (QSPM) (studi kasus: Bakpiapia Djogja)*" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemasaran pada produk Bakpia pia Djogja ? 2. Analisis strategi yang seperti apa yang dapat di pilih oleh Bakpiapia Djogja yang sesuai untuk di terapkan untuk pemasaran produknya ? metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah kuantitatif.³⁵

Pada penelitian terdahulu isi fokus masalahnya adalah pengaruh 2 variabel kepada pemasaran sehingga perlu mencari strategi

³⁴ Hasan habiburrohman, Implementasi Pelayanan Prima dan Strategi Promosi dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabaang Gresik, (Geresk: Universitas Suarabaya, 2016)

³⁵ Hesti Novianisa, Analisis strategi pemasaran pada usaha oleh oleh menggunakan metode swot dan quantitative strategic planning matrix (QSPM) (studi kasus: Bakpiapia Djogja), (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017)

pemasaran yang tepat untuk menghadapi faktor internal dan eksternal yang menjadi pengaruh terhadap pemasaran

Sedangkan peneliti menggunakan kata pemasaran sebagai fokus masalah sasaran untuk memasarkan produk jaminan sosial untuk kategori pekerja yang baru dibentuk.

- i. Skripsi Rifati Hanifa, 2017, yang berjudul “*Analisis strategik pengembangan usaha distro legacy*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1. Tingginya persaingan dalam usaha *distro* yang ada di Metro, memberikan dampak bagi manajemen *Distro Legacy Brand Store*. Berdasarkan wawancara dengan pihak *distro* bahwa pendapatan yang diterima *Distro Legacy Brand Store* mengalami fluktuasi setiap bulannya. Permasalahan ini mendorong peneliti untuk menganalisis alternatif strategi apa yang sesuai untuk dijalankan dalam upaya pengembangan usaha dengan terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan bagi *Distro Legacy Brand Store*, metode penelitian yang di gunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif .

Isi dari penelitian terdahulu ini menganalisa strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha *distro legacy brand store*, dengan penggunaan kata strategik sebagai arti rencana yang btepat untuk pengembangan usaha yang mulai menurun melalui faktor faktor 5W + 1H pada usaha *distro legacy brand store*.

Sedangkan peneliti menggunakan kata strategik pada arah perencanaan awal yang mengacu kepada tujuan, pemasaran dan target, dari kategori pekerja yang baru di bentuk dengan produk yang ada.

- j. kripsi Herman Santoso, 2017 yang berjudul *Strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan pada produk Asuransi Kesehatan di Asuransi Allianz Jakarta Pusat*, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Surabaya, Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menjadi anggota dalam asuransi kesehatan ? 2. Bagaimana penerapan Strategi yang tepat dalam pemasaran produk kesehatan diasuransi Allianz Jakarta Pusat ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif

Pada pembahasan dipenelitian terdahulu ini lebih kepada Pemasaran produk kesehatan dalam menghadapi persaingan di perusahaan asuransi yang meluncurkan produk yang sama dengan Asuransi Allianz Jakarta

Sedangkan peneliti lebih memfokuskan sasaran pemasaran untuk pekerja kategori Bukan Penerima Upah di Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

G.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian/tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi Sieven alfian, 2012, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Surabaya	Strategi sosialisasi klaim pencairan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT Jamsostek Cabang Pasuruan	Penelitian terdahulu membahas tatacara kalaim pencairan program JKK, pelayanan terhadap nasabah/peserta, sedangkan peneliti membahas rencana awal pembentukan kategori pekerja dan programnya, beserta pemasaran	Objek penelitian Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan, metode penelitian kualitatif deskriptif
2	Skripsi Wilfridus Delfri Otemusu, 2014 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor	Analisis strategi pemasaran produk asuransi kesehatan tenaga kerja pada PT. Jamsostek (persero) Cabang Bogor I, Jawa Bara	Perbedaan dari penelitian ini adalah euang lingkupnya kepada pemasaran,	Persamaan dari penelitian ini adalah subjeknya yang mana, peneliti mendalami tentang Jamsostek yang sekarang beralih status menjadi BPJS ketenagakerjaan, dan juga metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan deskriptif
3	Skripsi Raden Dendy Yudha Prawira, 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng	Strategi badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagaker	Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah titik fokusnya, yakni titik fokus dari di	Persamaan dari penelitian ini adalah metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode

No	Nama penelitian/tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
	Tirtayasa Serang	jaan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di kota tangerang	tulisan Raden Dendy Yudha Prawira mencakup peningkatan kesejahteraan peserta dengan	kualitatif
4	Skripsi, Elias samba rufus, 2015, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya,	Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta,	Objek utamma dalam penelitian ini adalah PT. Yoga Presisi Tehniktama Industri, dengan melibatkan program BPJS Ketenagakerjaan, yakni program JHT	Persamaan dalam penelitian ini adalah, metode penelitian yang di gunakan sama-sama metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
5	Skripsi, Nurul Anggraeni Hanifa 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri Jember	Pengaruh agen prisai dalam meningkatkan jumlah peserta program BPU di BPJS Keteagakerj a Cabang 2 Pasuruan	Perbedaan dari skripsi ini adalah, ruang lingkup dari penelitian ini adalah pengaruh dari agen prisai untuk meningkatkan peserta dalam kategori BPU, dan menggunakan metode penelitian kuantitatif, Sedangkan peniliti lebih kepada perencanaan awal pembentukan kategori pekerj BPU, dan menggunakan metode penelitian kuantitatif	Persamaan dari penelitian ini adalah objek yang menjadi penelitian yaki BPJS Ketenagakerjaan
	Skripsi, Firman	Pengukuran	Pada penelitian	Objek pada

No	Nama pnelitian/tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
6	syah, 2016, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogo	risiko asuransi dalam Penentuan Pembayaran premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor,	terdahulu ini, membahas tentang pengukuran risiko yang menjadi tolak ukur atas pembayaran premi salah satu program asuransi, Sedangkan peneliti meneliti tentang rencana pengembangan yang mengacu pada tujuan, sasaran pemasaran, dan target	penelitian sama-sama asuransi BUMN yakni BPJS Ketenagakerjaan, dengan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif
7	Skripsi, Hasan habiburrohman, 2016, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Surabaya,	Implementasi Pelayanan Prima dan Strategi Promosi dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabaang Gresik,	Pada penelitian terdahulu ini lebih membahas kepada pelayanan dan promosi program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik teruntuk semua kategori pekerja baim PU maupun BPU, sedangkan peneliti membahas tentang semua program yang di peruntukkan kepada tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian sama-sama BPJS Ketenagakerjaan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif
8	Skripsi Hesti Novianisa, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sunan	Analisis strategik pemasaran pada usaha oleh oleh menggunak	Pad skripsi karya Hesti Novianisa lebih fokus kepada perencanaan pemasaran, dengan metode swot dan	Persaman dari skripsi karya Hesti Novianisa adalah sama-sama

No	Nama penelitian/tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
	Kalijaga Yogyakarta	an metode swot dan quantitative strategic planning matrix (QSPM) (studi kasus: Bakpiapia Djogja)	quantitative strategic planning matrix (QSPM)	menganalisa perencanaan dari suatu perusahaan, dengan metode penelitian yang sama yakni kualitatif
9	Skripsi Rifati Hanifa, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung	Analisis Satrategik pengembangan usaha distro legacy	perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan judul ini adalah ruang lingkungnya lebih kepada Perencanaan pengembangan, sedangkan peneliti lebih kepada perencanaan awal dengan indikator tujuan dan sasaran pemasran	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan kata strategik yang maknanya sma (Perencanaan), dengan metode penelitian yang sama yakni kualitatifndengan pendekatan deskriptif
10	Skripsi Herman Santoso, 2017, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Surabaya	Strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan pada produk Asuransi Kesehatan di Asuransi Allianz Jakarta Pusat,	Pembahasan pemasaran dalam penelitian terdahulu ini untuk menemukan strategi yang tepat dalam persaingan dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi minat seseorang untuk menjadi nasabah/ anggota, objek yang di teliti asuransi Swasta	Dalam penelitian ini persamaannya adalah membahas pemasaran, dan tentang asuransi, di sisilain metode penelitian yang di gunakan sama-sama Kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu

Dalam penelitian terdahulu titik fokus pembahasan lebih kepada perencanaan pemasaran suatu produk, pengembangan produk dan strategi bersaing, dalam kelembagaan ada beberapa objek dalam penelitian terdahulu yang sama-sama meneliti tentang perlindungan pekerja diinstansi BPJS Ketenagakerjaan, namun dalam fokus pembahasannya yang dibahas lebih kepada pelayanan untuk pekerja pekerja Penerima Upah (PU).

Peneliti dalam hal penelitian ini lebih memfokuskan kepada manajemen perencanaan awal pembentukan suatu program perlindungan kerja kategori Bukan Penerima Upah, hal mendasar yang berbeda dari penelitian ini terletak pada manajemen pembentukan program dan kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

B. Kajian Teori

1. Strategik

Dalam membahas perkataan “strategik” sulit untuk dibantah bahwa penggunaannya diawali atau bersumber dari dan populer di lingkungan militer, di lingkungan tersebut penggunaannya lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai tugas dari seorang komandan dalam menghadapi musuh, yang bertanggung jawab mengatur cara, merencanakan taktik sebagai strategi peperangan, disamping itu secara lebih bebas perkataan strategi sebagai teknik dan taktik dapat di artikan juga sebagai “kiat”

seorang komandan untuk memenangkan peperangan yang menjadi tujuan pertama.³⁶

Kata strategik juga di artikan sebagai kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menentukan sifat dan arah suatu organisasi perusahaan³⁷

Kata strategik umumnya adalah kata yang sering di gunakan dalam dunia Militer, pada dasarnya kata Strategik bermakna

- a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.³⁸

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti lebih mengertikan kata starategik dengan makna “*Perencanaan*” agar lebih jelas dalam penguraian tujuan-tujuan di bentuknya suatu program jaminan sosial tenagakerja bukan penerima upah, dan mengetahui sasaran pemasarn beserta target yang di inginkan atas terbentuknya program tersebut

1) Perencanaan

Perencanaan yang merupakan salah satu arti kata dari strategik merupakan acuan utama bagi penulis untuk memaknai lebih jelas dari substansi yang ingin diteliti oleh penulis.

³⁶ Hadari nawawi, *Manajemen strategik*, (yogyakarta: Gadjah mada university press. 2000),147.

³⁷ Akdon, *strategic manajemen for educational management*(Bandung: Alfabeta, 2007),4.

³⁸ <https://kbbi.web.id/strategi>. diakses 19 November 2019

Pada intinya perencanaan dibuat sebagai upaya apa yang ingin dicapai sebuah organisasi atau perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin di capai dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.³⁹

Dalam buku *Manajemn Strategik* karya Hadari Nawawi kata perencanaan dimaknai dengan beberapa pengertian yakni:

- a) Pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program, proyek, metode, sistem (cara), anggaran dan standart (tolak ukur) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
- b) Perencanaan adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk di tetapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melaksanakannya, serta siapa pelaksananya
- c) Perencanaan adalah menetapkan secara sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecendrungan perubahan menuju pada tujuan yang telah di tetapkan.
- d) Perencanaan adalah kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah menjelesaikan suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu.⁴⁰

Esensi perencanaan sebagai fungsi dari manajemen adalah pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang akan atau tidak dilaksanakan, agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung

³⁹Rohimuddi, "interprenuer strategi", *ekonomi manajemen*, (januari, 2017),12

⁴⁰Hadari nawawi, *Manajemen strategik*, (yogyakarta: Gadjah mada university press. 2000,53.

secara efektif dan efisien, berdasarkan pengertian diatas perencanaan tidak lepas dari sebuah tujuan yang menjadi acuan dari produk yang diciptakan.⁴¹

untuk mencapai tujuan dari terciptanya suatu produk harus merumuskan sasaran pemasaran dan target yang ingin dicapai.

a) Tujuan

Perencanaan sebuah produk haruslah menetapkan suatu tujuan dibentuknya produk tersebut, penetapan tujuan merupakan titik awal dari sebuah perencanaan pemasaran, tujuan ini sangatlah penting dan harus di tetapkan sebelum mengabil sebuah strategi, dan strategi tanpa adanya tujuan yang pasti perusahaan tidak akan beroperasi dengan baik meskipun memiliki kesempatan yang baik.⁴²

Penetapan tujuan, perencanaan dimulai dengan penetapan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan perusahaan, untuk lebih mengefektifkan pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang ada, dari situ akan muncul sebuah tujuan yang jelas dari suatu perusahaan atau program yang dibuat, Akdon merumuskan tujuan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi organisasi

⁴¹ Hadari nawawi, *Manajemen strategik*, 2000, 54

⁴² Basu swasta, *manajemen pemasaran modern*, (yogyakarta: liberty yogyakarta, 2008),59.

- (2) Tujuan menyatakan kegiatan khusus apa yang akan di selesaikan dan kapan dilakukannya.⁴³

Menurut Basu tujuan adalah sebuah acuan dasar dari perusahaan dibentuk, sedangkan produk adalah suatu proses pencapaian dari tujuan perusahaan, pada dasarnya tujuan itu ada 2 yakni:

(a) Tujuan umum

Tujuan umum ini berhubungan dengan suatu perusahaan tersebut terbentuk, yang selarasa dengan Visi dan Misi perusahaan

(b) Tujuan khusus

Tujuan khusus ini berhubungan dengan suatu tujuan produk yang diciptakan oleh perusahaan, dimana produk ini dijadikan proses untuk mencapai tujuan umum.⁴⁴

Zaeni menyebutkan dalam bukunya Hukum Kerja, Jaminan sosial tenagakerja harus mengedepankan tujuan perlindungan pekerja dari risiko-risiko yang kemungkinan terjadi kepada pekerja yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar pendapatan, dan untuk memberikan perantara layanan medis bagi pekerja dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi

⁴³ Akdon, *Strategic manajemen for educational management*(Bandung: Alfabeta, 2007),145.

⁴⁴ Basu swasta, *manajemen pemasaran modern*, (yogyakarta: liberty yogyakarta, 2008),60.

dari terjadinya risiko bekerja serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.⁴⁵

b) Sasaran Pemasaran

Setiap usaha dalam menjalankan aktifitas usahanya selalu menyusun rencana kegiatan yang akan di lakukannya dalam rangka pencapaian tujuan usaha yang diharapkan, rencana yang disusun akan menjadi arah terhadap usaha yang di jalankan untuk mencapai tujuan.

Sasara pemasaran adalah salah satu indikator perencanaan pemasaran yang diturunkan dari tujuan terbentuknya suatu produk, setelah tujuan dan misi ditentukan maka tahap selanjutnya adalah merumuskan dasar pemasaran yang terdiri atas:

- (1) Siapa saja yang merupakan nasabah
- (2) Apakah kebutuhan-kebutuhan nasabah
- (3) Poduk dan layanan seperti apa yang di perlukan nasabah.⁴⁶

Selanjutnya tahap segmentasi yang sangat berkaitan dengan sasaran pemasaran, segmentasi pasar itulah yang akan menjadi fokus sasaran pemasaran.⁴⁷

Segmentasi pasar adalah pembagian pasar untuk mengelompokkan konsumen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda.⁴⁸

⁴⁵ Zaeni asyhadie, *Hukum kerja*, (jakarta: rajawali pers, 2008),112.

⁴⁶ A. subandi, *kekuatan sebenarnya dari audit pemasaran*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 34.

⁴⁷ Philip kotler, *manajemen pemasaran jilid 1*, terj. Bob sabran (jakarta: Erlangga, 2008),13.

⁴⁸ ibid, 228

Menurut Bashu dasar-dasar segmentasi yang dapat dipakai untuk segmentasi pasar adalah:

- (1) Faktor demografi : umur, kepadatan penduduk, jenis kelamin, agama, kesukuan, pendidikan, tingkat penghasilan
- (2) Faktor sosiologis, seperti: kelompok budaya, kelas-kelas sosial, dan sebagainya
- (3) Faktor psikologis, seperti: keperibadian, sikap, manfaat produk yang di butuhkan dan sebagainya
- (4) Faktor geografis, seperti: tempat tinggal, daerah daerah yang membutuhkan suatu produk yang sesuai dengan tempat.⁴⁹

Dari faktor-faktor diatas lalu dipilih untuk melakukan sasaran pemasaran

c) Target

Sebuah perusahaan mempunyai target yang mengacu pada tujuan dari sebuah produk yang di ciptakan dan juga pada sebuah tujuan perusahaan, tak menutup kemungkinan juga dari sebuah program jaminan sosial yang baru dibentuk oleh BPJS Ketenakerjaan untuk tenagakerja Bukan Penerima Upah, antara target dan sasaran pemasarn sangatlah berhubungan.

Target pemasaran adalah salah satu elemen penting dari strategi pemasaran, setelah perusahaan melakukan segmentasi

⁴⁹ Basu swastha, *manajemen pemasaran modern*, (Yogyakarta:liberty, 2008),90.

pasar barulah menentukan target yang ingin dicapai, target merupakan perkembang dari masing-masing segmentasi pasar.⁵⁰

Penentuan target menurut tjiptono dan candra dalam buku pemasaran strategik terdapat 5 cara sebagai berikut:

1) Single segmen

Yang mana perusahaan memilih 1 segmentasi untuk dijadikan target

2) Selective specialization

Yang mana perusahaan memilih segmen pasar yang atrkatif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki

3) Market specialization

Yang mana perusahaan memenuhi semua kebutuhan suatu kelompok tertentu

4) Product specialization

Memutuskan kepada suatu produk tertentu untuk memenuhi semua kebutuhan segmen

5) Full market coverage

Yang mana perusahaan memutuskan untuk melayani semua lini pasar berdasarkan fokus produknya dengan kuantitas konsumen tak terbatas.⁵¹

⁵⁰ Basu swastha, *manajemen pemasaran modern*, 70.

⁵¹ Tjiptono, Fandy, *pemasaran strategik*, (yogyakarta:ANDI, 2012), 162

2. Jaminan Sosial

Jaminan sosial dapat di artikan sebagai perlindungan yang di berikan oleh masyarakat (melalui lembaga jaminan sosial) bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat menyebabkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.⁵²

Adapun pengertian yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (untuk selanjutnya disingkat UU SJSN) Pasal 1 angka 1 UU SJSN adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵³

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja/pekerja/buruh pada zaman feodal adalah orang-orang yang bekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain orang-orang ini oleh orang belanda di sebut *blue collar* (berkerah

⁵²Zaeni asyadie, *Hukum kerja, Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*(Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007).113,

⁵³ Andika wijaya, *Hukum jaminan sosial Indonesia*(Jakarta:Sinar grafika, 2018),1.

biru), sedangkan sebutan untuk pegawai atau pekerja kantoran adalah *white collar* (berkerah putih)

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵⁴

Dalam hal ini para pemberi kerja wajib mengikut sertakan pekerjaanya dan dirinya sendiri sesuai dengan pasal 13 ayat 1 UU SJSN yang menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang harus di ikuti.⁵⁵

Pembagian peserta menurut Perpres No. 109 tahun 2013, secara umum dalam pasal 3 membagi peserta Program Jaminan Sosial menjadi dua yakni

1) Peserta/pekerja penerima upah (PU)

Adalah pekerja yang mendapatkan gaji atas pekerjaannya dari orang lain atau pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara

2) Peserta/pekerja Bukan Penerima Upah(BPU)

Adalah pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja (pekerja mandiri), pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima gaji atau upah.

⁵⁴ Zaeni asyadie, *Hukum kerja, Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*(Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007).21,

⁵⁵ sumber. kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember

a) Risiko

Risiko adalah ketidak tentuan atau *uncertainty* yang memungkinkan melahirkan kerugian,⁵⁶ Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut wideman, ketidak pastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*).⁵⁷

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan kalaupun rugi hanya kecil sekali. Selama mengalami kerugian walau kecil apapun hal itu dianggap risiko, dalam dunia tenaga kerja, risiko ini yang ditanggung oleh pekerja, adapun risiko yang di maksud dalam dunia kerja adalah risiko dalam waktu kerja dan di luar kerja

⁵⁶ Abbas salim, *Asuransi & manajemen risiko*(jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007),4.

⁵⁷ Asli nuryadin, *Manajemen Risiko*, (Jember: Center for Society Studies (CSS), 2012), 1

1) Risiko pribadi dan keluarga

Risiko yang pasti terjadi kepada pekerja adalah kehilangan pendapatan yang berimbas kepada keluarga, seseorang bisa kehilangan pendapatannya disebabkan:

- (a) Kematian, kematian yang di alami pekerja entah di luar jam kerja ataupun di waktu jam kerja, akan mengakibatkan kehilangan pendapatan
- (b) Cacat permanen, artinya seseorang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja karena kecelakaan atau di sebabkan lain hal dan menyebabkan kehilangan pendapatan
- (c) Cacat sementara, artinya pekerja tidak dapat bisa bekerja sementara waktu karna kondisi cacat namun bisa sembuh
- (d) Pengangguran, seseorang menganggur bukan karena hanya tidak dapat kerja saja, namun baru di berhentikan/PHK dari perusahaan tempat dia bekerja.⁵⁸

2) Risiko harta kekayaan

Risiko harta kekayaan adalah risiko yang menyangkut harta kekayaan perorangan atau kelompok yang di sebabkan karena hancurnya harta kekayaan tersebut, karena suatu hal yang tidak di sengaja

⁵⁸ Abbas salim, *Asuransi & manajemen risiko*(jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007),6.

3) Risiko tanggung jawab

Risiko jenis ini adalah mengenai risiko dari seseorang yang menurut hukum berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya risiko yang menimpa pekerja atau buruh yang bekerja, risiko ini adalah tanggung jawab dari perusahaan yang bersangkutan.⁵⁹

3. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah Asuransi Sosial dari pemerintah untuk melindungi seluruh pekerja melalui 4 produk, BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu lembaga asuransi pemerintah yang menjamin terlindungnya sosial ekonomi tenaga kerja, sebagai mana dari pengertian asuransi dalam buku Bank dan lembaga keuangan lainnya diartikan menanggung sesuatu yang mungkin terjadi dan yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.⁶⁰

Dalam undang-undang No 2 tahun 1992 dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

⁵⁹ mahmudah, *manajemen risiko bisnis*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2010), 90.

⁶⁰ Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2012).259,

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁶¹

Dalam perasuransian di Indonesia yang khusus untuk tenaga kerja di amanatkan oleh pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang sebelumnya bernama PT. Jamsostek (Persero) namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka PT. Jamsostek (persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang di resmikan pada 1 Januari 2014.⁶²

Sebuah kewajiban dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin rasa aman dari pesertanya, dan sebuah kewajiban dari peserta untuk membayar premi yang ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja.

a. Premi/iuran wajib

Premi/iuran wajib adalah setoran wajib dari peserta dengan tujuan pengalihan risiko, tarif premi ditentukan oleh gabungan penanggung berdasarkan kondisi, usia, besaran risiko.⁶³

Sedangkan dalam dunia pekerja di tentukan dalam pasal 17 ayat 1 SJSN, secara jelas membebaskan kewajiban bagi peserta untuk membayar iuran yang besarnya di tetapkan berdasarkan prosentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu, bagi pemberi kerja berkewajiban menarik iuran dari pekerjanya, dengan teknis pemotongan gaji dan penambahan iuran yang menjadi kewajibannya, besarnya iuran, baik bagi peserta maupun pemberi kerja, ditetapkan

⁶¹ www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292_1389086128

⁶² Abbas salim, *Asuransi & Manajemen risiko*, (Jakarta: Pt Raja geafindo persada, 2007), 43

⁶³ Abbas salim, *Asuransi & Manajemen risiko*, (Jakarta: Pt Raja geafindo persada, 2007), 57

untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial.⁶⁴

Untuk mendapatkan manfaat dari 4 program yang di sediakan oleh BPJS maka peserta diwajibkan untuk membayar premi, 4 program tersebut adalah sebagai berikut

Adapun program-program yang di sediakan adalah sebagai berikut:

1) Jaminan Kecelakaan kerja (JKK)

Yang mana peserta dapat merasakan manfaatnya ketika risiko kecelakaan pada saat atau sedang mau bekerja terjadi

2) Jaminan Kematian (JKM)

Adalah program kusus ahli waris apabila peserta meninggal dunia diluar hubungan kerja

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Adalah program simpanan pekerja yang dapat di cairkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian diserahkan kepada peserta/ ahli waris peserta apabila yang bersangkutan sudah memasuki usia pensiun, peserta meninggal dunia, atau peserta mengalami cacat total tetap.

4) Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta

⁶⁴ Andika wijaya, *Hukum jaminan sosial Indonesia*(Jakarta:Sinar grafika, 2018),24.

dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, dengan syarat tertentu.⁶⁵



⁶⁵ www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir.⁶⁶ Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶⁷ Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif yang pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendiskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).⁶⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁶⁹ Yang mana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber.

⁶⁶ Tim Penyusun, *Pedoman*, 53.

⁶⁷ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 127.

⁶⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 338.

⁶⁹ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 135.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember tepatnya di Jl. Letjen sutoyo No. 15A, Kebonsari, Sumbersari, Jember, lokasi ini berdasarkan letak kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang jember, peneliti memilih BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Jember dikarenakan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember adalah kantor Cabang 2 yang berhak mengakses rekapitulasi jaminan hari tua, dan berhak mengintruksikan hal yang berhubungan dengan perlindungan kerja kepada kantor Cabang 3 seperti Lumajang dan Bondowoso, dari itu peneliti memutuskan penelitian di lakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember.⁷⁰

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁷¹

Untuk menentukan sumber data, peneliti menggunakan metode *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁷²

⁷⁰ Sumber. Staf kepala bidang SDM BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman*, 43.

⁷² Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 66.

Adapun subjek yang dipilih peneliti adalah:

1. Buk Agni selaku Staf SDM

Peneliti memilih Buk Agni selaku staf SDM untuk memperoleh dokumen struktur organisasi serta tugas-tugas dari struktur organisasi, sejarah kategori kerja BPU dan sebagai pembanding dari permasalahan yang diangkat peneliti

2. Bpk. Hadi selaku Kepala Bidang Pemasaran

Peneliti memilih Bpk. Hadi selaku Kepala Bidang Pemasaran untuk memperoleh data berupa sasaran pemasaran, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pemasaran dan juga sebagai pembanding dari permasalahan yang diangkat peneliti

3. Bpk. Ibra selaku Kepala Bidang Pelayanan

Peneliti memilih Bpk. Ibra selaku Kepala Bidang Pelayanan untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen tentang peserta BPU, serta sebagai pembanding dari permasalahan yang diangkat peneliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁷³ observasi ini dilakukan

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) 226

peneliti untuk mempermudah penelitian dan juga menetapkan informan yang tepat dalam menjawab masalah yang diangkat oleh peneliti.

Observasi terbagi menjadi 2 yakni observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur.

- a. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.
- b. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasikan. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.⁷⁴

Peneliti dalam teknik observasi menggunakan teknik observasi terstruktur, yang mana peneliti sudah merancang waktu pengamatan yang selanjutnya akan menetapkan informan sebagai perbandingan data untuk menguji keabsahan data

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai organisasi, motivasi perasaan, orang, kejadian, kegiatan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai, Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa

⁷⁴*Ibid* 145

dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.⁷⁵

Adapun informan yang ditetapkan peneliti adalah:

- a. Ibuk Agni selaku staf SDM
- b. Bpk Hadi selaku kepala bidang pemasaran
- c. Bpk. Ibra selaku kepala bidang Pelayanan

Dalam wawancara ini peneliti akan memperoleh data berupa:

- 1) Sejarah BPJS Ketenagakerjaan
 - 2) Sejarah kategori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
 - 3) Tujuan di bentuknya program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU)
 - 4) Sasaran pemasaran dari program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU)
 - 5) Target yang ingin di capai dari program jaminan sosial untuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU)
3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang akan berlalu.

Dokumen biasanya berbentuk lisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang, Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.⁷⁶

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 233

⁷⁶ *ibid*, 240

Adapun dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh dari informan adalah

- a. Struktural organisasi, Visi misi yang diminta kepada Ibu Agni selaku Staf SDM
- b. Dokumentasi yang berkaitan dengan pemasaran yang diminta kepada Bpk. Ibra selaku Kepala bidang pemasaran

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.⁷⁷

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif* yaitu memberikan gambaran mengenai Analisis strategik program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU), dan apabila data tersebut sudah terkumpul keseluruhannya maka kemudian peneliti melakukan analisis data. Menganalisis data yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga komponen yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, reduksi data dengan mengidentifikasi dan mengklarifikasikan data tentang rencana

⁷⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian* (UIN-Maliki Press, 2008), 119.

terbentuknya program jaminan sosial untuk tenaga kerja bukan penerima upah, agar bisa memaparkan pokok-pokok masalah yang ingin diteliti seperti tujuan pembentukan, sasaran pemasaran beserta target yang ingin dicapai, sesuai dengan fokus permasalahan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deret, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data lapangan.⁷⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dari penyajian data dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab fokus masalah penelitian, serta memberi kejelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus masalah.⁸⁰

F. Keabsahan Data

Penelitian ini, menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber.⁸¹ Triangulasi adalah

⁷⁸ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B*, 2015, 247

⁷⁹ *ibid*, 249.

⁸⁰ *ibid*, 259.

⁸¹ *ibid*, 274.

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu melalui :

1. Perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Perbandingan apa yang dikatakan seseorang didepan umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi
3. Perbandingan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Perbandingan keadaan dan perspektif seseorang berpendapat sebagai rakyat biasa, dengan yang berpendidikan dan pejabat pemerintah
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan. hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.⁸²

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian yaitu:

1. Tahap Pralapangan
 - a. Mencari lokasi penelitian, yaitu di Jl. Letjen sutoyo No. 15A, Kebonsari, Sumbersari, Jember
 - b. Menyusun proposal penelitian
 - c. Mengurus surat izin penelitian

⁸² Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, 372.

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada kepala bidang pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Staf SDM BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Kepala Bidangn pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember

2. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jl. Letjen sutoyo No. 15A, Kebonsari, Summersari, Jember, lokasi ini berdasarkan letak kantor BPJS Ketenagkerjaan cabang jember, peneliti memilih BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Jember di karenakan kantor BPJS setapak kuda selain jember adalah Kantor Cabang 2, data peserta serta pencetakan RSJHT haruslah di lakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember selaku Kantor Cabang 2, dari itu peneliti memutuskan penelitian di lakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember.⁸³

2. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang di danai oleh peserta sendiri.⁸⁴

Sejarah terbentuknya BPJS ketenagakerjaan di mulai dari UU No.33/1947 dan UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, peraturan menteri perburuhan (PMP) No.48/1952 dan PMP No.8/1956 tentang

⁸³ Sumber, Staf kepala bidang SDM BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember

⁸⁴ Zaeni asyadie, *Hukum kerja, Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*,(Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007).15.

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggara kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan yayasan sosial buruh, PMP No.5/1956 tentang pembentukan yayasan dana jaminan sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja.⁸⁵

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, tatacara penyelenggaraan dan bentuk perlindungan, pada tahun 1977 di keluarkanlah peraturan pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan kepada setiap pemberi kerja/pengusaha swasta maupun BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1997 tentang perum ASTEK.⁸⁶

Tidak sampai disitu transformasi pun terus di lakukan untuk lebih majunya sebuah asuransi sosial ekonomi, pada tahun 1992 lahirlah UU No. 3 tentang jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK), dan melalui PP No.36/1995 ditetapkanlah PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, programnya adalah memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, karena risiko sosial.⁸⁷

⁸⁵Hairun najib,*hukum jaminan sosial buruh*, (jakarta: Rajawali pers, 2017),78.

⁸⁶Laporan tahunan 2017, memperkuat kapabilitas dalam mendukung perluasan ketenagakerjaan,55.

⁸⁷ *ibid*, 57

Tahap selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU No.40/2004 tentang jaminan sosial nasional (SJSN). Undang-undang itu berhubungan dengan amandemen UUD 1945 pasal 34 ayat 3, yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberi rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan produktivitas kerja.⁸⁸

Pada tahun 2011, ditetapkanlah UU No.24/2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Sesuai amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum publik, PT. Jamsostek yang bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan, dengan perubahan nama tersebut tidak mengurangi kepercayaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang mempunyai produk JKK, JKM, JHT serta jaminan pensiun (JP) sebagai produk baru mulai 1 Juli 2015.⁸⁹

Kini dengan sistem penyelenggara yang semakin maju, program BPJS ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, namun juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini

⁸⁸ Andika wijaya, *Hukum jaminan sosial Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 36

⁸⁹ Laporan tahunan 2017, memperkuat kapabilitas dalam mendukung perluasan ketenagakerjaan, 56.

pelayanan sambil mengembangkan program dan manfaat yang langsung dapat di nikmati oleh pekerja dan keluarganya.⁹⁰

3. Visi Misi BPJS Ketenagakerjaan

Adapun Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember adalah :

- a. Visi BPJS ketenagakerjaan Cabang Jember adalah:
”menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) berkelas dunia, bersahabat serta dan unggul dalam oprasional dan pelayanan”.
- b. Misi BPJS ketenagakerjaan cabang jember adalah:”sebagai badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan menjadi mitra yang layak bagi:
 - 1) Tenaga kerja: memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya
 - 2) Pengusaha: menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktifitas
 - 3) Negara: berperan serta dalam pembangunan.⁹¹

4. Sejarah Program Jaminan Sosial untuk Tenagakerja Bukan Penerima Upah (BPU)

PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP

⁹⁰<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>

⁹¹ Sumberdata. Staf kabid SDM.

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.⁹²

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK, pada saat itu kategori pekerja hanya Pekerja Penerima Upah (PU), karna pengertian tenagakerja diwaktu itu dalam Peraturan Pemerintah No. 33/1997 Pasal 1 ayat 2 berbunyi, *Tenaga kerja adalah buruh yang bekerja pada perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta karyawan yang bekerja pada Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri.*⁹³

⁹² www.bpjsketenagakerjaan.com

⁹³ Lihat PP No. 33 tahun 1997, tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja

Dari pengertian tenagakerja yang di jelaskan dalam PP No. 33/1997 sudah jelas perlindungan tenagakerja yang di selenggarakan oleh Asuransi kusus tenagakerja hanya untuk Tenagakerja Penerima Upah saja,

Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengganti Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial dan perlindungan tenagakerja di waktu itupun hanya mencakup pekerja Penerima Upah saja.⁹⁴

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.⁹⁵

⁹⁴ Andika wijaya, *Hukum jaminan sosial Indonesia*(Jakarta:Sinar grafika, 2018), 37

⁹⁵ Hairun najib, *hukumjaminan sosial buruh*, (jakarta: Rajawali pers, 2017),102.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011 dan ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Seiring perubahan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan mengingat peraturan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat sebagai SJSN untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, Maka kategori perlindungan tenagakerja dikembangkan lagi menjadi dua kategori yakni pekerja Penerima Upah (PU) dan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang memiliki cakupan pekerja yang lebih luas dan diberlakukan pada tahun 2015, perencanaan pengembangan kategori pekerja memang sudah

dibahas sejak tahun 2013 oleh menteri ketenagakerjaan namun dengan nama pekerja lepas.⁹⁶

Namun karena beberapa faktor yang tidak memadai program tersebut baru disosialisasikan dan disahkan Juli 2015, disisilain pemebentukan kategori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) berdasarkan pengertin jaminan sosial dalam UU No. 40 tahun 2004 menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.⁹⁷

5. Struktur organisasi

struktur organisasi adalah bentuk atau bagan pengelompokan pekerja yang pembagiannya disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, dilihat dari wilayah kerjanya yang begitu luas, maka perusahaan tersebut mempunyai bidang-bidang tugas yang sudah di persiapkan dengan jelas dan tertata rapi, di bagi sesuai kemampuan dan skil masing masing individu utuk mencapai sebuah tujuan oraganisas.⁹⁸

Adapun stuktur dan tugas tupoksi organisasi pada BPJS ketenagakerjaan Cabang 2 Jember dapat dilihat sebagai berikut:

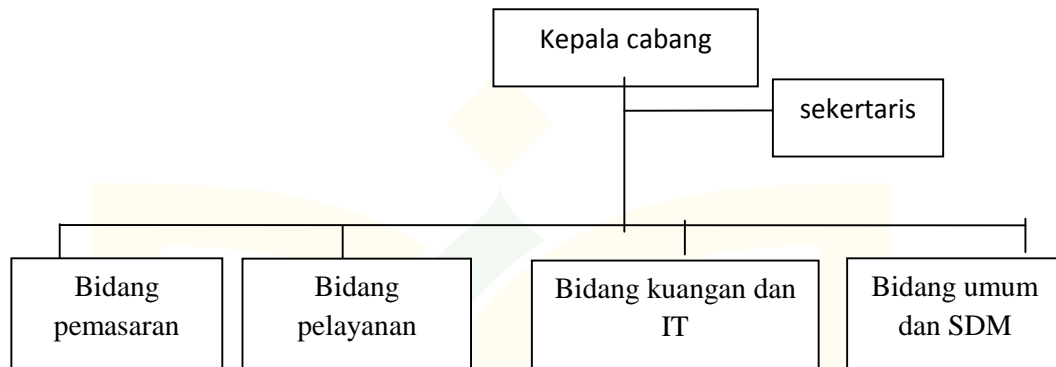
⁹⁶ <https://www.cermati.com/artikel/program-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-pekerja-lepas-BPU>, diakses 14 desember 2018

⁹⁷ Perpres UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

⁹⁸ Akdon, *strategic manajemen for educational management*(Bandung: Alfabeta, 2007), 36

A.1

Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan



Sumber: *Staf kabid SDM BPJS Ketenagakerjan Cabang Jember*

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah:

a. Kepala Kantor Cabang

Tugas dari kepala kantor cabang adalah mengarahkan, mengevaluasi, dan sebagai nahkoda dalam operasional di kantor cabang, selaras dengan kebijakan dari kantor wilayah, guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah secara optimal sesuai standart yang berlaku di perusahaan.

Tanggung jawab dari kepala kantor cabang

- 1) Menyusun dan memantau implementasi rencana kerja dan anggaran tahunan cabang
- 2) Mengendalikan kegiatan pengembangan formal dan iformal selaras dengan kebijakan kanwil 1, guna memastikan tercapainya target pemasaran

- 3) Memantau kegiatan pengolahan peserta dicabang 3 guna memastikan tercapainya target peningkatan iuran
- 4) Mengarahkan dan memantau penyelenggaraan program, manfaat, dan kegiatan pelayanan, guna tercapainya kepuasan pelanggan
- 5) Memastikan tersedianya dukungan teknologi informasi bagi kegiatan operasional, agar terciptanya kelancaran dan efektifitas pekerja
- 6) Memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan untuk menjaga efisiensi penggunaan dana
- 7) Mengendalikan pengelolaan SDM di kantor cabang, untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai untuk menjaga kapabilitas SDM.⁹⁹

b. Sekertaris Cabang

Sekretaris cabang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, rapat intern/ekstern, administrasi personal, serta sarana prasarana kerja pada kantor cabang, guna mendukung kelancaran kerja kepala kantor cabang.

Adapun tanggung jawab sekretaris cabang

- 1) Mengatur jadwal acara kegiatan kepala kantor cabang untuk mendukung kelancaran kegiatan

⁹⁹ sumber, Staf kabid BPJS Ketengakerjaan Cabang Jember

- 2) Menyiapkan bahan atau konsep dokumen (Misalnya surat jawaban), untuk mempermudah kepala kantor cabang memberikan respon
- 3) Melaksanakan tata persuratan bagi kepala kantor sehingga dokumen tertata secara sistematis
- 4) Mengelola rapat kepala kantor cabang agar rapat berjalan dengan lancar
- 5) Mengelola dokumen yang berkaitan dengan kepala kantor cabang agar terdokumentasi dan mudah untuk di akses
- 6) Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan perlengkapan kantor, agar kegiatan berjalan lancar dan efektif
- 7) Mengelola komunikasi kepala kantor cabang baik yang berupa langsung maupun tidak langsung, untuk membantu efektifitas komunikasi.¹⁰⁰

c. Bidang Pemasaran

Bidang pemasaran bertugas untuk merencanakan program pemasaran (untuk pengembangan kepesertaan melalui program customer relationship manajemn (CRM) di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja Relationship officer (RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan dan iuran di cabang tercapai secara efisien

¹⁰⁰ sumber, Staf kabid BPJS Ketengakerjaan Cabang Jember

Bidang pemasaran memiliki tanggung jawab sebagai berikut

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan pemasaran, untuk menjaga efektifitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya
- 2) Menyusun program pemasaran (dalam rangka menambah kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di kantor cabang selaras dengan strategi di kanwil
- 3) Mengkoordinasi implementasi program pemasaran dan memantau tingkat pencapaian, untuk memastikan target kepesertaan tercapai secara efektif dan efisien
- 4) Melakukan monitoring terhadap pelayanan administrasi kepesertaan dan menangani keluhan guna menjaga kepuasan peserta
- 5) Memantau kinerja dan membina relationship officer (RO) untuk memastikan telah mengikuti standart dan ketentuan yang berlaku
- 6) Menerapkan customer relationship managemen (CRM) sebagai bagian dari program pengelolaan kepesertaan di cabang, untuk memberikan nilai tambah bagi peserta yang sudah terdaftar
- 7) Menyusun laporan kegiatan guna menyusun penyusunan laporan kegiatan cabang
- 8) Mengelola implemtasi manajemen risiko di bidangnya.¹⁰¹

¹⁰¹ sumber, Staf kabid BPJS Ketengakerjaan Cabang Jember

d. Bidang pelayanan

Bidang pelayanan bertugas merencanakan, mengkoordinasi serta memantau penyelenggaraan dan pelayanan program guna memastikan bahwasanya kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar serta memenuhi standart dan kualitas yang di tentukan

Tanggung jawab bidang pelayanan adalah.

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pelayanan, guna menjaga efektifitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya
- 2) Mengkoordinasi proses penetapan jaminan, guna memperoleh besaran jaminan yang akurat
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan bagi peserta, agar sesuai dengan standart mutu yang telah di tetapkan
- 4) Mengkoordinasi penyelesaian keluhan peserta, guna meningkatkan kepuasan mereka
- 5) Menyusun lapporan kegiatan guna mendukung penyusunan laporan kegiata cabang
- 6) Mengelola implementasi manajemen risiko di cabangnya

e. Bidang keuangan dan teknologi informasi

Bidang kuangan & TI bertugas mengontrol dan mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pengeolaan uangan dan teknoligi informasi di kantor cabang guna memberi dukungan

pada aspek keuangan dan TI bagi kegiatan oprasional yang efektif dan efisien

Adapun tanggung jawab dari bidang keuangan & TI adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bidang keuangan dan TI, untuk menjaga efektifitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya
- 2) Mengkompilasi rencana anggaran tiap unit kerja untuk memperoleh acuan dalam pengelolaan dana
- 3) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan agar kegiatan oprasional cabang dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien
- 4) Mengkoordinasikan pencatatan transaksi keuangan untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan kantor cabang, untuk memastikan kewajiban pajak telah di penuhi sesuai ketentuan
- 6) Mengelola penerimaan dan pengeluaran dana yang terkait dengan kepesertaan, guna memastikan akurasi pengelolaan dan untuk ketepatan pencatatan
- 7) Mengkoordinasikan penyediaan dan pemeliharaan sarana teknologi informasi, sehingga tersedia tepat waktu dan dapat di gunakan tiap hari

- 8) Mengkoordinasikan pengelolaan dukungan teknologi informasi bagi kegiatan operasional sehingga kegiatan operasional berjalan secara efektif dan efisien
- 9) Mengkoordinasikan keamanan pengelolaan sistem jaringan dan keamanan database, sehingga data aman dan untuk menghindari penyalahgunaan akses
- 10) Menyusun laporan kegiatan guna mendukung penyusunan laporan kegiatan cabang
- 11) Mengelola implementasi manajemen risiko di bidangnya.¹⁰²

f. Bidang Umum dan SDM

Bidang umum dan SDM bertugas mengkoordinasikan dan mengontrol dan memantau kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang dan jasa pemeliharaan aset dan pelayanan umum bagi pegawai, serta hubungan komunikasi dengan pihak eksternal dan internal guna memberikan dukungan pada aspek SDM & umum bagi kegiatan kelancaran bisnis di kantor cabang, Adapun tanggung jawab dari bidang umum & SDM adalah

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang umum & SDM untuk menjaga efektifitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya
- 2) Mengelola pemenuhan kebutuhan SDM guna memastikan efektivitas penempatan di cabang sesuai dengan spesifikasi jabatan

¹⁰² sumber, Staf kabid BPJS Ketengakerjaan Cabang Jember

- 3) Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung tercapainya sandart kompetensi yang di persyaratkan
- 4) Memantau kinerja dan mengelola hubungan industrial di lingkungan kantor cabang, guna meciptakan lingkungan kerja yang kondusif
- 5) Mengelola pemenuhan hak pegawai di kantor cabang dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, sehingga hak dapat di berikan tepat jumlah dan tepat waktu
- 6) Mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk kantor cabang sesuai dengan prosedur yang berlaku, untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan pengguna dengan harga yang efisien serta ualitas yang terjamin
- 7) Mengelola sarana dan prasarana kerja sesuai prosedur yang berlaku, untuk keamanan dan optimalisasi aset
- 8) Mengelolalayanan umum bagi pegawai di kantor cabang untuk mendukung kelancaran kerja
- 9) Mengelola kegiatan komuikasi internal dan eksternal perusahaan untuk menjaga citra perusahaan
- 10) Mengelola database di lingkungan kerja, sehingga data tersedia lengkap, akurat dan terkini
- 11) Menyusun laporan kegiatan guna mendukung penyusunan laporan kegiatan cabang
- 12) Mengelola implementasi manajemen resiko di bidangnya.¹⁰³

¹⁰³ sumber, Staf kabid BPJS Ketengakerjaan Cabang Jember

6. Cara mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

- a. Mempunyai NIK
- b. Mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran
- c. menghubungi:
 - 1) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
 - 2) Wadah
 - 3) Mitra/payment point yang ekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran iuran dapat di lakukan oleh peserta sendiri atau melalui wadah mitra/payment poin selama 1 bulan/3 bulan/6 bulan/ 1 tahunsekaligus.¹⁰⁴

7. Estimasi upah dan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan

Dasar penghasilan penetapan manfaat minimal 1 juta dengan iuran

sebagai berikut:

A.2

Tabel penetapan iuran program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah	Nilai iuran
Jaminan kecelakaan kerja	1% berdasarkan nominal upah
Jaminan kecelakaan kerja	Rp. 6.800,-
Jaminan hari Tua	2% berdasarkan nominal upah

Sumber: *Brosur program BPU*

8. Program BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) serta manfaatnya

BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan program publik yang

¹⁰⁴Sumber data, Brosur Program jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme jaminan sosial.¹⁰⁵

Ruang lingkup Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan Layananan Jasa asuransi sosial kusus tenagakerja dengan program :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja, sebagai suatu jenis resiko kerja, sangat mungkin terjadi pada kondisi apapun dan dalam bidang pekerjaan apapun, akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi tubuh, cacat total tetap atau bahkan meninggal dunia, dari resiko tersebut yang tidak bisa di hindarai maka perlu suatu perlindungan jika hal tersebut sudah benar-benar terjadi.¹⁰⁶

Memeberi rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab pemberi kerja melalui pengalihan risiko kepada BPJS ketenagakerjaan, program jaminan kecelakaan kerja (JKK) ini memberikan perlindungan atas risiko yang harus di hadapi oleh tenaga kerja yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi ketika si pekerja dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun sebaliknya dan penyakit yang di sebabkan oleh lingkungan kerja, iuran

¹⁰⁵ www.bpjsketenagakerjaan.go.id

¹⁰⁶ sumber. Brosur program jaminan sosial BPJS BPU & PU

di bayarkan oleh perusahaan, sesuai kelompok resiko lingkungan kerja¹⁰⁷

1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK)

JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja

1) Biaya pengangkutan umum

Darat, sungai, danau	Rp. 1.000.000,-
Laut	Rp. 1.500.000,-
Udara	Rp. 2.500.000,-

Sumber: Brosur program BPJS Ketenagakerjaan untuk PU

Jika menggunakan lebih dari satu jasa angkutan makan berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan

2) Biaya pengobatan dan perawatan

Biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis

3) Sementara tidak mapu bekerja (STMB)

Enam bulan pertama	100% x upah sebulan
Enam bulan ke dua	75% x upah sebulan
Enam bulan ke tiga dan seterusnya	50% x upah sebulan

Sumber: Brosur program BPJS Ketenagakerjaan untuk PU

4) Penggantian gigi tiruan

Rp. 3.000.000,- (maksimum)

¹⁰⁷ Hairun najib, *hukum jaminan sosial buruh*, (Jakarta:rajawali pers, 2017), 26

5) Santunan cacat

Cacat total sebagian anatomis	% tabel x 80 x upah sebulan
Cacat total tetap	75% x 80 x upah sebulan
Cacat sebagian fungus	% kurangi fungsi x % tabel x 80 x upah sebulan

Sumber: Brosur program BPJS Ketenagakerjaan untuk PU

6) Santunan kematian

Santunan kematian	60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar (JKM))
Berkala di bayar sekaligus	24 bulan x Rp. 2.00.000,- =Rp. 4.800.000,-
Biaya pemakaman	Rp. 3000.000,-

Sumber: Brosur program BPJS Ketenagakerjaan untuk PU

7) Biaya Rehabilitasi

Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus ketentuan harga sesuai patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medical.¹⁰⁸

8) Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa di berikan kepada 1 anak peserta yang masih aktif sekolah sebesar Rp. 12.000.000,- untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sumber, Brosur Program jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU)

¹⁰⁹ ibid

b. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan hari tua merupakan program penghimpun dana yang di tujukan sebagai simpanan yang dapat di pergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti oleh karena berbagai sebab, mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat total tetap berhenti bekerja (PHK, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya), atau selesainya kontrak kerja.¹¹⁰

1) Manfaat jaminan hari tua (JHT)

Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat di ambil sekaligus apabila peserta telah sudah berhenti menjadi peserta, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 bulan) pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian samapai batasan tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun.¹¹¹

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran dari semenjak pertama terdaftar menjadi peserta sampai berhenti bekerja yang telah di setor dan di tambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan (RSJHT) dan di bayarkan sekaligus.¹¹²

Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk

¹¹⁰ ibid

¹¹¹ sumber, Kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember

¹¹² Hairun najib, *hukum jaminan sosial buruh*, (jakarta: Rajawali pers, 2017), 20

kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.¹¹³

c. Jaminan Kematian (JKM)

Program jaminan kematian (JKM) dipruntukkan bagi ahli waris peserta BPJS ketenagakerjaa yang meninggal duni bukan karena kecelakaan kerja. JKM di perlukan untuk membantu meingankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.¹¹⁴

1) Manfaat jaminan kematian (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti

- a) Santunan kematian Rp. 16.000.000,-
- b) Santunan berkala Rp. 200.000,- x 24 bulan di bayar sekaligus
- c) Biaya pemakaman Rp. 3.000.000,-
- d) Beasiswa pendidikan 1 anak di berikan kepada setiappeserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan telah menjadi kepesertaan dengan masa paling singkat 5 tahun sebesar Rp. 12.000.000,-.¹¹⁵

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Bagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data–data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah adalah:

¹¹³ ibid, 22

¹¹⁴ Hairun najib, *hukum jaminan sosial buruh*, (jakarta: Rajawali pers, 2017), 23

¹¹⁵ ibid, 24

1. Tujuan Dibentuknya Program Jaminan Sosial Untuk Tenagakerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Tujuan merupakan titik awal dari sebuah strategi, strategi tanpa adanya suatu tujuan tidak akan beroperasi secara baik meskipun memiliki kesempatan yang baik.¹¹⁶

Tujuan produk tergantung pada sebuah tujuan perusahaan yang di bentuk, karen produk yang dipasarkan merupakan penjalan dari sebuah Misi, sejatinya sebuah tujuan perusahaan adalah suatu tujuan umum yang dijadikan patokan dari tujuan produk yang diciptakan dan juga harus selaras dengan misi.

Hal ini sperti yang diungkapkan Bpk. Ibra selaku Kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember dalam wawancara pada tanggal 07 Maret 2019, menyatakan :

“Dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenagkerja ini profit itu bukan acuan utama bagi kita, kami menjalankan tugas kami berlandaskan peraturan Undang-Undang, latar belakang dari pembentukan BPU berdasarkan UUD 1945 alinea 4, dan selaras dengan tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, Dan juga di perjelas dalam UU No.40 tahun 2004, pembentukan atas kategori pekerja Bukan Penerima Upah untuk tercapainya hidup yang layak bagi selurh rakyat indonesi itu tertuang dalam UU No. 40/2004, jadi latar belakang dari pembentukan kategori pekerja bukan penerima upah ini bukan semata-mata kita mencari keuntungan, jelas dalam laporan tahunan sebelum BPU terbentuk keuangan BPJS Ketenagakerjaan aman-aman saja, dari itu landasan profit atas terbentuknya BPU itu tidak ada, landasan kita sebenarnya kembali ke UU, disisi lain memang selaku penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan milik Negara wajib bagi kita melindungi segenap tenagaerja yang ada di indonesia, semua sudah di jelaskan di UU,

¹¹⁶ Basu swasta, *manajemen pemasaran modern*, (yogyakarta: liberty yogyakarta, 2008),59.

yang juga di harapkan bisa membantu negara dalam mensejahterakan rakyat melalui elemen tenaga kerja,”¹¹⁷

Begitupula yang disampaikan Bpk. Hadi selaku Kepala bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember tentang tujuan program jaminan sosial tenaga kerja bukan penerima upah dalam wawancara pada 8 Maret 2019,

“Awal mula sebelum di cetuskannya BPJS, Jaminan sosial tenaga kerja berada di bawah naungan BUMN, yang mana memang secara substansial Profit memang di butuhkan, setelah beralih status menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka BPJS itu sendiri menjadi suatu badan yang independen yang sudah menjadi Badan Usaha Milik Negara, karena memang landasan utamanya kita melindungi seluruh tenaga kerja indonesia yang memang sudah menjadi kewajiban sebuah negara dan sebagai azas tujuan Negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”* dari landasan UUD 1945 itu BPJS ketenagakerjaan memang berkomitmen untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia melalui elemen tenaga kerja, jadi basisnya kita bukan keuntungan semata, mungkin ada yang mengira bagaimana kalau mengalami kerugian ?, BPJS di bentuk tidak semerta-merta di bentuk begitu saja namun melalui proses yang panjang dengan perhitungan yang matang, jadi dari iuran yang di tetapkan, hingga jaminan yang di berikan sudah di perhitungankan, kalau semisal ada pembekakan yang dapat merugikan wajib sebuah negara mensuplay, karena suatu perlindungan yang kita berikan ini memang kewajiban negara, pada intinya latar belakang kami terbentuk sebagai penanggulangan kerugian akibat risiko sosial ekonomi pekerja untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan pekerja, dan juga menekan angka kehilangan penghasilan yang menyebabkan kesenjangan sosial, maksud dan tujuan program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) selaras dengan tujuan dibentuknya lembaga jaminan sosial ini pada intinya adalah Menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja beserta keluarganya mealalui sistem jaminan sosial, jadi secara tidak

¹¹⁷ Pak Ibra, Kabid pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Wawancara, 7 maret 2019

langsung penjelasan yang tadi adalah sub penjabaran dari maksud dan tujuan disini”¹¹⁸

Begitupula yang disampaikan Ibu Agni Staf SDM BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember tentang tujuan dibentuknya program jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah melalui wawancara pada tanggal 8 Maret 2019,

“Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan, tidak lain hanya sekedar lembaga yang memegang amanah pemerintahan untuk memberikan salah satu hak perlindungan sosial ekonomi bagi tulang punggung keluarga, kami menjalankan tugas sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan menjadi mitra yang layak bagi pekerja, perusahaan dan negara sesuai misi yang kami emban, karena kami badan publik milik negara, sesuai dengan visi misi yang kita usung maka kami berdiri sesuai dengan tujuan Negara yang tercantum dalam UUD 1945, karena pada dasarnya negara wajib melindungi warganya, jadi memberikan perlindungan itu adalah sebagai bentuk memberikan hak kepada warga negara, hak-hak warga negara kan banyak, hak akan hukum, ahak akan kelayakan ekonomi, hak atas pekerjaan, dan banyak lagi hak-hak warga negara, dan hak dasar warga negara adalah terlindungi, nah disini negara mengambil peran untuk memenuhi salah satu hak dasar warga negaranya melalui konsep Jaminan sosial yang tercantum dalam UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan juga UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan aturan-aturan turunanya, dari itu latar belakang kami di bentuk bukan untuk memperjuangkan profit perusahaan, namun menjalankan tugas negara sebagai pemenuhan salah satu hak dasar warga negara yakni hak atas jaminan sosial.¹¹⁹

Dari wawancara yang dilakukan kepada 3 informan didapati informasi tentang tujuan utama dari BPJS Ketenagakerjaan adalah berdasarkan sebuah tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD Indonesia tahun 1945 alinea ke empat.¹²⁰ sejalan dengan itu tujuan dibentuknya program untuk tenagakerja BPU adalah sebagai penerapan

¹¹⁸ Pak Hadi, Kabid Pemasaran, wawancara, tanggal 8 maret 2019

¹¹⁹ Buk agni, staf kabit SDM, wawancara, tanggal 8 maret 2019

¹²⁰ Lihat UUD 1945

tujuan dari lembaga BPJS Ketenagakerjaan dibentuk, dan juga UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN, yang memang dasarnya adalah perlindungan untuk bangsa yang dikususkan pada jaminan sosial, disini lain sesuai dengan judul yang peneliti ambil dimana kata strategik yang di artikan sebagai perencanaan yang tertuju kepada sebuah tujuan pembentukan sesuatu, yang jelas mengarah kepada Visi dan Misi sebagai badan penelenggara jaminan sosial (BPJS) yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenagakerja, pembentukan kategori BPU ini sebagai tangga perlindungan bagi rakyat indonesia yang wajib diberi perlindungan oleh negara, salah satu cara melalui sektor jaminan sosial yang di selenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamah seluruh sektor pekerja, tujuan dari program perlindungan kerja bagi pekerja BPU adalah sebagaimana tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Sasaran Pemasaran Program Jaminan Sosial Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Sasaran pemasaran adalah salah satu indikoator perencanaan pemasaran yang diturunkan dari segmentasi pasar, untuk mencapai suatu tujuan, dasar dari segmentasi pasar adalah dilihat dari beberapa faktor dan faktor tersebut dipilih untuk dijadikan fokus sasaran pemasaran.¹²¹

kusus program sosial tenagakerja, seluruh tenagakerja yang ada di Indonesia, bahkan WNA yang bekerja dan menetap di Indonesia, bahkan WNI yang bekerja diluar negri, yang bekerja kepada selain penyelenggara

¹²¹ Philip kotler, *Manajemen pemasaran jilid 1*, terj. Bob sabran (Jakarta: Erlanga, 2008), 13

negara maka berhak atas jaminan sosial tenaga kerja baik pekerja formal maupun informal, ranah pekerja non formal di ataur dalam Permenaker No.1 tahun 2016.¹²²

Seperti yang di sampaikan oleh Bpk. Ibra selaku Kepala bidang Pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember melalui wawancara pada tanggal 7 januari 2019.

“Setiap penduduk selama tidak bekerja terhadap orang lain atau tidak masuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah berhak atas 2 jamina sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan hanya membayar premi minimal Rp. 16.800 dengan estimasi penghasilan satu bulan sebesar Rp. 1.000.000-, sudah mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, cakupan sasaran peserta itu bukan hanya pekerja mandiri saja, bahkan siswa magang, ataupun mahasiswa yang praktek lapangan wajib ikut, intinya siswa ataupun mahasiswa yang praktek di suatu instansi itu wajib untuk ikut dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Mandiri, dengan batasan umur maksimal 56 tahun, bahkan orang yang ikut pelatihan kerja di BLK pun wajib ikut, itu sudah di atur oleh Permanaker No.1 tahun 2016, semisal magang, atau praktek lapangan selama 3 bulan maka wajib selama 3 bulan itu di lindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar premi Rp. 16.800 setiap bulannya, jika ingin ikut program tambahan ada istilah Jaminan Hari Tua, yang berbentuk tabungan untuk persiapan para pekerja di masa sudah tidak mampu bekerja lagi, ada 3 program yang di sediakan untuk BPU yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM), ada Jaminan Kemarian (JM), ada program persiapan hari tua yakni Jaminan Hari Tua (JHT), 3 program itu bisa di ikuti peserta BPU secara bertahap, ”¹²³

Begitupula yang disampaikan Bpk. Hadi Kepala bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, memaparkan sasaran pemasaran sebagai berikut

“Sasaran pemasaran dari program BPU ini dari sektor pekerja non formal, atau orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha

¹²² Permenaker No.1/2016, tentang tatacara penyelenggaraan program JKK,JKM,JHT bagi BPU

¹²³ Pak Ibra, kabid pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Wawancara, 7 maret 2019.

secara mandiri untuk memperoleh penghasilan, yang berpenghasilan minimal 1.000.000 dengan pembayaran iuran 16.800 dengan mendapatkan 2 perlindungan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematia, pada dasarnya semua pekerja selama itu WNI formal atau pun non formal wajib kita lindungi, dari pekerja non formal itu sendiri batas maksimal pendaftara pada usia 56 tahun, sedangkan batas minimalnya adalah selama seseorang itu berpenghasilan, dan juga termasuk yang di jelaskan dalam Permenaker No. 1 tahun 2016 yang di dalamnya di jelaskan bahwa pekerja magang, siswa praktek, tenaga honorer itu berhak atas perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, sasaran kita memang pekerja yang di luar kategori pekerja Penerima Upah, jadi dalam perlindungan ketenagakerjaan semenjak 2016 ada kategori 2 pekerja yang memang kelas sosialnyapun didalam lingkungan kerja berbeda”¹²⁴

Dari wawancara yang dilakukan terhadap 2 informan didapati informasi dan data berupa kategori pekerja Bukan Penerima Upah mencakup seluruh pekerja yang tidak termasuk pekerja Penerima Upah, baik guru honorer, ojek, supir, tukang sampah, pekerja-pekerja online, tukang parkir bahkan youtuber bahkan juga siswa atau mahasiswa yang melakukan kegiatan praktek, hal ini pun di ataur oleh Permenaker No.1 tahun 2016 pasal 4 ayat 1, *“tenagakerja magang, siswa praktek, tenaga honorer atau narapidana dalam proses asimilasi yang di pekerjakan pada pemberi kerja kepada selain penyelenggara Negara, apa bila mengalami kecelakaan kerja maka berhak atas manfaat JKK”*.¹²⁵ Dengan batasan maksimal umur 56 tahun

¹²⁴ Pak Hadi, Kabid Pemasaran, wawancara, 8 maret 2019

¹²⁵ Permaker No. 1 tahun 2016, tatacara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi peserta bukan penerima upah

3. Target Yang Ingin Di Capai Dari Program Jaminan Sosial Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Target pemasaran adalah salah satu elemen penting dari strategi pemasaran, setelah perusahaan melakukan segmentasi pasar barulah menentukan target yang ingin dicapai, target merupakan perkembangan dari masing-masing segmentasi pasar.¹²⁶

Begitupula dengan BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki suatu target yang ingin dicapai, menurut Bpk. Hadi selaku Kepala bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember tentang target sebagai berikut,

“Sebenarnya target dari BPJS sendiri adalah tersentuhnya seluruh pekerja di Indonesia baik dari sektor formal dan non formal ataupun pekerja migran untuk dilindungi, namun itu perlu bertahap, akan tetapi dari sektor non formal kendalanya sendiri adalah kurangnya kesadaran dari pekerja, karena memang dasarnya pekerja dari sektor non formal sulit teridentifikasi, tidak mungkin dengan SDM dari BPJS Ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia kita melakukan strategi dor to dor, dari itu kita menggait asosiasi-asosiasi pekerja, dan juga mengencangkan sosialisasi dan mempermudah pelayanan pendaftaran, sebenarnya dalam mengemban amanah untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan tenaga kerja, itu harus dilakukan semua pihak, baik dari pemerintah melalui aturan, ataupun pihak BPJS Sendiri dan juga masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan tenaga kerja untuk menyadarkan masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya perlindungan tenaga kerja ini, 3 elemen ini harus saling sinergi demi tercapainya perlindungan bagi pekerja seluruh Indonesia, dalam mekanisme perlindungannya tidaklah jauh beda dengan PU, maksimal usia pendaftaran 56 tahun, jika sudah 56 tahun maka tidak bisa ikut serta dalam program BPU¹²⁷

¹²⁶ Basu swastha, *manajemen pemasaran modern*, 70.

¹²⁷ Pak hadi, Kabid pemasaran BPJS Ketenagakerjaan cabang jember, wawancara, 8 maret 2019

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bpk Ibra selaku kepala bidang pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember,

“ Berbicara target yang ingin dicapai ya semua pekerja yang ada di Indonesia ataupun WNI yang bekerja di luar negeri itu menjadi target kita, akan tetapi ada tahapan yang di tentukan oleh kantor, apa lagi dari sektor non formal memang sudah di atur oleh UU akan tetapi SDM yang kita miliki memang tidak sebanding dengan jumlah pekerja di seluruh Indonesia, dari itu pada tahun 2019 direncanakan sebagai tahun *Aggressive growth*, artinya apa pertumbuhan kepesertaan harus benar-benar tumbuh dengan luar biasa, dengan targetnya harus jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, dari *Aggressive growth* yang direncanakan ini cakupan pemasaran lebih luas lagi dengan 3 semangat namanya yakni ASQ, yang pertama Akuisi bagaimana saat sosialisasi tidak hanya mensosialisasikan program-program saja namun bisa langsung daftar ketika kita melakukan sosialisasi, pendaftaran pun bisa di lakukan dengan menggunakan aplikasi BPJS-TKU, Website ketenagakerjaan, PRISAI, bahkan melalui Whatsap juga bisa hal ini di lakukan untuk mencakup kepesertaan lebih luas lagi, yang ke Dua semangat *Sustainable* yakni bagaimana caranya peserta BPU ini terdaftar dan selalu membayar iuran lanjutan perbulannya ini juga yang menjadi fokus kita, kan banyak hanya terdaftar hanya beberapa bulan saja terus berhenti tidak membayarnya lagi, yang ketiga adalah semangat *Quality*, *Quality* disini adalah kualitas data, kan tujuan kedepan ini pemerintah merencanakan 1 orang mempunyai Nomer Induk Kependudukan NIK, nah dari NIK itu kita nanti bisa mengetahui status pekerjaan dari si pemilik NIK tersebut, jadi kalau sudah data valid kita bisa mengetahui penduduk yang mana yang belum terdaftar seperti itu, nah 3 semangat ini yang akan kita lakukan untuk mencapai atau melebihi target”¹²⁸

Dari 2 informan yang diwawancarai mengenai target yang ingin di capai didapati informasi dan data target utama BPJS Ketenagakerjaan ini adalah terlindungnya seluruh pekerja yang ada di Indonesia, dan seluruh pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Sedangkan dalam pangsa pemasaran, kepesertaanpun memiliki target yang di tentukan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat, sebagai

¹²⁸ Pak Ibra, Kabid pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, wawancara, 7 Maret 2019

target nasional yakni 34,5 juta tenagakerja pada tahun 2019, yang akan di bagi kesetiap kantor-kantor cabang daerah, Cabang 2 dan KCP di tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan cabang jember kusus daerah jember mempunyai target sebesar 152.326 tenagakerja, sedangkan dalam data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember penduduk jember yang bekerja sebesar 1.117.132 jiwa termasuk ABRI dan Pegawai Negri, untuk Angkatan bersenjata dan PN itu ada jaminan sosialnya masing-masing, target yang sudah di capai pada awal tahun oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang jember adalah 22.848 Pekerja,¹²⁹ dari itu untuk menjangkau semua pekerja yang ada di daerah Jember tidak bisa dilakukan dalam kurunwaktu 1 tahun saja, karna memang faktor SDM dari penyelenggara yang terbatas jumlahnya disisi lain, jumlah pekerja setiap tahunnya baik dari pekerja formal ataupun non formal selalu bertambah,

C. Pembahasan Temuan

1. Tujuan Dibentuknya Program Jaminan Sosial Untuk Tenagakerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Perencanaan sebuah produk haruslah menetapkan suatu tujuan di bentuknya produk tersebut, penetapan tujuan merupakan titik awal dari sebuah perencanaan pemasaran, tujuan ini sangatlah penting dan harus di tetapkan sebelum mengabil sebuah strategi, dan strategi tanpa adanya tujuan yang pasti perusahaan tidak akan beroperasi dengan baik meskipun

¹²⁹Sumber data dari kapid pemasaran, target kepesertaan, 8 maret 2019

memiliki kesempatan yang baik.¹³⁰ Akdon mengemukakan bahwasanya perumusan tujuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi organisasi
- b. Tujuan menyatakan kegiatan khusus apa yang akan di selesaikan dan kapan dilakukannya.¹³¹

Menurut Basu tujuan adalah sebuah acuan dasar dari perusahaan dibentuk, sedangkan produk adalah suatu proses pencapaian dari tujuan perusahaan, pada dasarnya tujuan itu ada 2 yakni:

1) Tujuan Umum

Tujuan umum ini berhubungan dengan suatu perusahaan tersebut terbentuk, yang selaras dengan Visi dan Misi perusahaan

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus ini berhubungan dengan suatu tujuan produk yang di buat oleh perusahaan, dimana produk ini dijadikan proses untuk mencapai tujuan umum.¹³²

Jadi menurut Basu tujuan umum adalah sebuah tujuan dibentuknya perusahaan tersebut, sedangkan tujuan khusus adalah sebuah tujuan dari produk yang dibuat, menurut Zaeni Jaminan sosial tenagakerja harus mengedepankan tujuan perlindungan pekerja dari risiko-risiko yang kemungkinan terjadi kepada pekerja yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar pendapatan, dan untuk memberikan

¹³⁰ Basu swasta, *manajemen pemasaran modern*, (yogyakarta: liberty yogyakarta, 2008),59

¹³¹ Akdon, *Strategic manajemen for educational management*(Bandung: Alfabeta, 2007),143

¹³² Basu swasta, *manajemen pemasaran modern*, (yogyakarta: liberty yogyakarta, 2008),60.

perantara layanan medis bagi pekerja dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya risiko bekerja serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.¹³³

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan tujuan dari program jaminan sosial untuk tenaga kerja Bukan Perima Upah (BPU) tidak berdasarkan kepada keuntungan, BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan usaha milik negara yang murni dibentuk untuk menjalankan tugas negara, dan juga sebagai salah satu roda bagi tujuan suatu negara dibentuk yang tertuang dalam UUD 194, dalam pasal 3 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berbunyi “*sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya*” memberikan kebutuhan dasar hidup, kebutuhan dasar hidup dalam hal ini adalah kebutuhan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia juga sebagai salah satu tugas negara yang dilimpahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Jika dilihat dari beberapa teori dan penjelasan dari informan, maka tujuan dari program jaminan sosial tenaga kerja BPU sesuai dengan teori akdon tentang tujuan yakni

- 1) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi organisasi.

¹³³ Zaeni asyhadie, *Hukum kerja*, (Jakarta: (rajawali pers, 2008),112

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada 3 informan yakni Kabid pelayanan, Kabid pemasaran, staf kabid SDM, di BPJS Ketenagakerjaan Cbang Jember, maka diperoleh data bahwasanya tujuan dari program BPU selaras dengan Tujuan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan tujuan BPJS Ketenagakerjaan sangat serasi dengan Visi Misi BPJS Ketenagakerjaan, adapun Misi BPJS Ketenagakerjaan yang menurut Buk Agni selaku Staf Kabid SDM adalah:

Misi BPJS ketenagakerjaan adalah:”sebagai badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan menjadi mitra yang layak bagi:

- a) Tenaga kerja: memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya
- b) Pengusaha: menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktifitas,
- c) Negara: berperan serta dalam pembangunan.

Dari Visi Misi BPJS Ketenagakeerjaan serta tujuan dari program perlindungan kerja yang diungkapkan oleh informen maka, tujuan menurut teori akdon dari poin pertama sangat jelas bahwasanya tujuan dibentuknya program jaminan sosial serasi dan kegiatan atas program tersebut merupakan penjabaran dari Misi organisasi

Penjabaran diatas merupakan kolerasi antara teori akdon dan data yang diperoleh peneliti dilapangan, selama proses penelitin pada tanggal 7-8 maret lewat wawancara.¹³⁴

Teori Basu menyatakan tujuan adalah sebuah acuan dasar dari perusahaan dibentuk, sedangkan produk adalah suatu proses pencapaian dari tujuan perusahaan, pada dasarnya tujuan itu ada 2 yakni:

(1) Tujuan Umum

Tujuan umum ini berhubunga dengan suatu perusahaan tersebut terbentuk, yang selaras dengan Visi dan Misi perusahaan, yakni menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenagakerja Indonesia beserta keluarganya mealalui sistem jaminan sosial

(2) Tujuan Kusus

Tujuan kusus ini berhubungan dengan suatu tujuan produk yang di buat oleh perusahaan, dimana produk ini dijadikan proses untuk mencapai tujuan umum, dalam program Peperlindungan pekerja bagi BPU ini tujuan kususnya adalah sebagai program yang bisa melindungi pekerja mandiri dan bisa menjamah seluruh pekerja yang ada di Indonesia atau WNI yang menjadi TKI.¹³⁵

Dari data yang diperoleh peneliti tujuan umum yang berhubungan dengan perusahaan itu terbentuk adalah sebuah

¹³⁴ Sumber. Staf kapid SDM BJS Ketenagakerjaan Cabang Jember

¹³⁵ Basu swasta, *manajemen pemasaran modern*, (yogyakarta: liberty yogyakarta, 2008),60.

tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri yakni, Menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial.

Tujuan khusus yakni diharapkan dengan adanya program jaminan sosial tenaga kerja untuk tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan bisa menjalankan kerjanya secara efektif untuk mencapai perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia yakni lewat program jaminan sosial untuk tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU)

2. Sasaran Pemasaran Program Jaminan Sosial Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Sasaran pemasaran adalah salah satu indikator perencanaan pemasaran yang diturunkan dari tujuan terbentuknya suatu produk, setelah visi dan misi ditentukan maka tahap selanjutnya adalah merumuskan dasar pemasaran yang terdiri atas

- a. Siapa saja yang merupakan nasabah
- b. Apakah kebutuhan-kebutuhan nasabah
- c. Produk dan layanan seperti apa yang diperlukan nasabah.¹³⁶

Menurut Kotler sasaran pemasaran adalah fokus dari segmentasi pasar, segmentasi pasar adalah membagi-bagi pasar menurut kriteria, segmentasi pasar itulah yang akan menjadi fokus sasaran pemasaran.¹³⁷

¹³⁶ A. Subandi, *kekuatan sebenarnya dari audit pemasaran*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 34.

Teori segmentasi menurut Basu dapat di analisa dari:

- 1) Faktor demografi: umur, kepadatan penduduk, jenis kelamin, agama, kesukuan, pendidikan, tingkat penghasilan
- 2) Faktor sosiologis, seperti: kelompok budaya, kelas-kelas sosial, dan sebagainya
- 3) Faktor psikologis, seperti: keperibadian, sikap, manfaat produk yang di butuhkan dan sebagainya
- 4) Faktor geografis, seperti: tempat tinggal, daerah daerah yang membutuhkan suatu produk yang sesuai dengan tempat.¹³⁸

Sasaran pemasaran yang diungkapkan oleh informen yakni Kabid Pemasaran dan kabid pelayanan dalam program jaminan sosial untuk tenagakerja bukan penerima upah adalah, pekerja-pekerja diluar definisi pekerja Penerima Upah, juga dijelaskan dalam Peraturan menteri ketenagakerjaan No.1 tahun 2016, dengan pemaksimalan umur pendaftar 56 tahaun, dan kewajiban membayarkan iuran sebesar Rp. 16.800,-, dari iuran sebesar itu dihitung estimasi upah pekerja sebesar Rp. 1000.000,- dengan 2 perlindungan minimal yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan yakni perlindungan Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Perlindungan Jaminan Kematian (JKM)

Jika melihat pemaparan teori Subandi tentang perumusan dasar pemasaran di atas, bisa di sesuaikan berdasarkan informasi yang di dapat peneliti dari informan tentang sasaran pemasaran,

¹³⁷ Philip kotler, *manajemen pemasaran jilid 1*, terj. Bob sabran (jakarta: Erlangga, 2008),13.

¹³⁸ Basu swastha, *manajemen pemasaran modern*, (Yogyakarta:liberty, 2008),90.

- a) Siapa saja yang menjadi nasabah ? di jelaskan oleh informan bahwasanya siapa yang menjadi nasabah yang di sebut peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah seluruh tenagakerja yang ada di indonesia ataupun WNI yang bekerjaa di luar indonesia bahkan WNA yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan.
- b) Apa kebutuhan-kebutuhan nasbah ? sesuai dengan UU SJSN BPJS Ketenagakerjaan memberikan sebuah perlindungan dasar yang bersifat produktif bagi seluruh tengakerja, entah hal itu disadari atau tidak oleh pekerja namun pada dasarnya memang perlindungan pekerja adalah sebuah kebutuhan dasar bagi seluruh pekerja dan keluarganya,
- c) produk dan layanan seperti apa yang di butuhkan nasabah ? BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelengra jaminan sosial tenagakerja menyediakan produk kebutuhan dasar yang memang benar-benar di butuhkan oleh pekerja pada umumnya, dengan pelayanan perlindungan 24 jam, untuk pekerja yang mengalami risiko kerja, produk yang di berikan dalam hal ini berbentuk jasa perlindungan kusus bagi pekerja dengan program Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua.

Jika dikolerasikan antara teori Basu yang diatas dengan data yang di peroleh peneliti, segmentasi pasar yang dipilih dan dijadikan sasaran pemasaran oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- (1) Faktor demografi: yang di jadikan sasaran pemasara dari faktor demografi adalah, yang pertama Umur, BPJS Ketengakeran

memaksimalkan umur pendaftar baru dibawah 56 tahun , yang ke 2 Tingkat penghasilan, yang mana dalam hal tingkat penghasilan BPJS Ketenagakerjaan meminimalkan estimasi penghasilan sebesar Rp. 1000.000,-,

- (2) Faktor psikologis: yang di jadikan sasaran pemasara dari faktor psikologis adalah sebuah kemanfaatan produk yang memang benar benar dibutuhkan pekerja sebagai perlindungan dasar bagi pekerja
- (3) Faktor geografis: yang di jadikan sasaran pemasara dari faktor adalah daerah-daerah pekerja yang memang notabandnya terdapat risiko yang mengancam pekerja dan kapanpun risiko tersebut bisa terjadi.

Kesimpulannya adalah sasaran pemasaran dari program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja Bukan Penerima Upah adalah, perlindungan pekerja bagi pekerja yang bekerja mandiri, dibawah usia 56 tahun bagi pekerja yang memang pada dasarnya memiliki risiko.

3. Target yang ingin dicapai dari program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU)

Target pemasaran adalah salah satu elemen penting dari strategi pemasaran, setelah perusahaan melakukan segmentasi pasar barulah menentukan target yang ingin dicapat, target merupakan perkembang dari masing-masing segmentasi pasar yang dipilih untuk dijadikan fokus pemasaran.¹³⁹

¹³⁹ Basu swastha, *manajemen pemasaran modern*, 70.

Penentuan target menurut tjiptono dan candra dalam buku pemasaran strategic terdapat 5 cara sebagai berikut:

a. Single Segmen

Yang mana perusahaan memilih 1 segmentasi untuk dijadikan target

b. Selective Specialization

Yang mana perusahaan memilih segmen pasar yang atrkatif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki

c. Market Specialization

Yang mana perusahaan memenuhi semua kebutuhan suatu kelompok tertentu

d. Product Specialization

Memutuskan kepada suatu produk tertentu untuk memenuhi semua kebutuhan segmen

e. Full Market Coverage

Yang mana perusahaan memutuskan untuk melayani semua lini pasar berdasarkan fokus produknya dengan kuantitas konsumen tak terbatas.¹⁴⁰

Data yang diperoleh oleh peneliti lewat wawancara kepada Kabid Pemasaran dan Kabid pelayanan mengenai target adalah, target utamanya adalah satau Nomer Induk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan menjamah peserta secara bertahap melalui target penambahan peserta yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan

¹⁴⁰ Tjiptono, Fandy, *pemasaran strategic*, (yogyakrta:ANDI, 2012), 162

pusat dan lalu dibagi kepada kantor-kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu diseluruh indonesia, dengan usia maksiml 56 tahun, pencapaian pada tahun 2019 didukung dengan variasi pelayanan yang Aggressive growth, artinya apa pertumbuhan kepesertaan harus benar-benar tumbuh dengan luar biasa, dengan targetnya harus jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, dari Aggressive growth yang direncanakan ini cakupan pemasaran lebih luas lagi dengan 3 semangat namanya yakni ASQ, yang pertama Akuisi bagaimana saat sosialisasi tidak hanya mensosialisasikan program-program saja namun bisa langsung daftar ketika kita melakukan sosialisasi, pendaftaran pun bisa di lakukan dengan menggunakan aplikasi BPJS-TKU, Website ketenagakerjaan, PRISAI, bahkan melalui Whatsap juga bisa hal ini di lakukan untuk mencakup kepesertaan lebih luas lagi, yang ke Dua semangat Sistinable yakni bagaimana caranya peserta BPU ini terdaftar dan selalu membayar iuran lanjutan perbulannya ini juga yang menjadi fokus kita, kan banyak hanya terdaftar hanya beberapa bulan saja terus berhenti tidak membayaar lagi, yang ketiga adalah semangat Qualiti, Qualiti disini adalah kualitas data, kan tujuan kedepan ini pemerintah merncanakan 1 orang mempunyai Nomer Induk Kependudukan NIK, nah dari NIK itu kita nanti bisa mengetahui status pekerjaan dari si pemilik NIK tersebut, jadi kalau sudah data falid kita bisa mngetahui penduduk yang mana yang belum terdaftar seperti itu,

nah 3 semangat ini yang akan kita lakukan untuk mencapai atau melebihi target.

Dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan berdasarkan literatur tentang target, maka dapat dikolerasikan antara teori dan data yang bersumber dari informan BPJS Ketenagakejaan Cabang Jember

Bashu menyatakan target adalah perkembangan dari segmentasi pasar yang di pilih untuk dijadikan fokus pemasaran, sedangkan segmentasi pasar yang di jadikan fokus BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor demografi: yang di jadikan sasaran pemasara dari faktor demografi adalah, yang pertama Umur, BPJS Ketengakeran memaksimalkan umur pendaftar baru dibawah 56 tahun , yang ke 2 Tingkat penghasilan, yang mana dalam hal tingkat penghasilan BPJS Ketenagakerjaan meminimalkan estimasi penghasilan sebesar Rp. 1000.000,-,
- 2) Faktor psikologis: yang di jadikan sasaran pemasara dari faktor psikologis adalah sebuah kemanfaatan produk yang memang benar benar dibutuhkan pekerja sebagai perlindungan dasar bagi pekerja
- 3) Faktor geografis: yang di jadikan sasaran pemasara dari faktor adalah daerah-daerah pekerja yang memang notabandnya terdapat risiko yang mengancam pekerja dan kapanpun risiko tersebut bisa terjadi.

Dan pengembangan dalam segmentasi pasar yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sepanjang pengetahuan peneliti berdasarkan data dari informan yang dapat dikolerasikan dengan teori Tjiptono dan Candra adalah:

a) Market specialization

Yang mana perusahaan memenuhi semua kebutuhan suatu kelompok tertentu, yakni kelompok pekerja indonesia, jadi yang dijadikan target adalah kelompok pekerja indonesia

b) Product Specialization

Memutuskan kepada suatu produk tertentu untuk memenuhi semua kebutuhan segmen, yakni produk jasa perlindungan kerja bagi segmentasi Psikologis, Demografi dan Geografis

c) Full Market Coverage

Yang mana perusahaan memutuskan untuk melayani semua lini pasar berdasarkan fokus produknya dengan kuantitas konsumen tak terbatas, yakni BPJS Ketenagakerjaan melayani semua kalangan berdasarkan produk perlindungan kerja dengan target konsumen yang tidak seluruh WNI, namun untuk mencapai target itu BPJS Menerapkan target bertahap yakni 34,5 juta tenagakerja pada tahun 2019, yang akan dibagi kesetiap kantor-kantor cabang daerah, Cabang 2 dan KCP di tahun 2019 BPJS

Ketenagakerjaan cabang jember kusus daerah jember mempunyai target sebesar 152.326 tenagakerja



BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis strategik program jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan untuk tenagakerja bukan penerima upah(studi kasus bpjs ketenagakerjaan cabang jember)maka dapat disimpulkan:

1. Tujuan dibentuknya program jaminan sosial tenagakerja bukan penerima upah adalah untuk mencapai perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia yakni lewat program jaminan sosial untuk tenagakerja Bukan Penerima Upah (BPU)
2. Sasaran pemasaran untuk tenagakerja bukan penerima upah adalah, setiap pekerja-pekerja mandiri yang tidak termasuk kedalam kategori pekerja Penerima Upah
3. Target yang ingin di capai adalah sesuai pengembngan dari segmentasi pasar yakni, Psikologis, Demografi dan Geografi konsumen dengan penerapan Market specialization, Product specialization, Full market coverage

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Analisis strategik program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja Bukan Penerima Upah” adalah sebagai berikut.

1. Tujuan juga menyatakan kegiatan kusus apa yang akan di selesaikan dan kapan dilakukannya, karena memang dalam tujuan menurut akdon bukan hanya masalah tentang menjabarkan misi, akan tetapi sebuah kegiatan kusus yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu
2. Sasaran pemasaran juga memperhatikan faktor sosiologis, yang mana harus memperhatikan kelas sosial pekerja, untuk dijadikan ukuran tingkat risiko, sebagai pemfokusan sasaran pemasaran

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2007. *Strategic Management For Educational Managemnt*. Bandung: Alfabeta
- Anthony, robert A. Tjakrawala, Kurniawan. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba empat.
- Asyadi, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta:Rajawali Pers
- Asyhadie, zaeni. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenagakerja Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Beni, Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Brosur BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
- Darmawan Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- J. Moloeng Lexy. 2009. *Metodologi Penellitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Kasiram Moh. 2008. *Metode Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Laporan tahunan 2017. *Memperkuat Kapabilitas Dalam Mendukung Perluasan Ketenagakerjaan*
- Najib, hairun. 2017. *Hukum Jaminan Sosial Buruh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subandi A. 2005. *Kekuatan Sebenarnya Dari Audid Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swasta, bashu.2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tjiptono, Fendi, Gregorius Candra. 2012. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta. Andi

Wijaya, Andika. 2018. *Hukum Jaminan Sosial Indonesi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Yuliana, rahma. 2013. Analisis strategi pemasran pada produk sepeda motor matik berupa segmentasi pasar, tergeting, dan positioning serta pengaruhnya terhadap kepurusan pembeli konsumen di semarang. Vol. 5. Semarang: Stie Semarang.

Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup.

<https://tugasmagic.wordpress.com/category/manajemen-strategik/>

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

www.bpn.go

www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292_1389086128.

<https://kbbi.web.id/strategi>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbahul Hasan
Nim : 083 143 188
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS STRATEGIK PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK TENAGAKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JEMBER)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali pengutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember,
Saya yang menyatakan



Misbahul Hasan
NIM. 083 143 188

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis strategik di bentuknya program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan untuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) (Studi kasus BPJS ketenagakerjaan Cabang Jember)	a. Strategik	1. Perencanaan a. Tujuan b. Sasaran pemasaran c. Target	1. Data primer a. Kepala pelayanan b. Kepala Pemasaran c. Staf kabid SDM	1. Pendekatan Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif. 2. Jenis Penelitian Adalah Penelitian Lapangan 3. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Apa tujuan dibentuknya program jaminan social untuk pekerja bukan penerima upah(BPU) 2. Siapa saja sasaran pemasaran dari program jaminan social untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) 3. Apa target yang ingin di capai dari program jaminan sosial untuk kpekerja bukan penerimaupah (BPU)
	b. Jaminan sosial	2. Tenaga kerja a. Penerima upah (PU) b. Bukan penerima upah (BPU)	2. Data Sekunder a. Dokumentasi b. Kepustakaan	4. Teknik Keabsahan Data Menggunakan Teknik Triangulasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penyimpulan Data	
	c. BPJS Ketenagakerjaan	3. Risiko a. Pribadi dan keluarga b. Harta kekayaan c. Tanggung jawab 3. Premi/iuran wajib a. JHT b. JKK c. JKM d. JP			

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS STRATEGIK PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK TENAGAKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JEMBER)

Data yang harus di minta yaitu :

1. Visi- Misi BPJS Ketenagakerjaan
2. Struktur Organisasi

Data yang harus di minta melalui wawancara :

1. Sejarah berdirinya BPJS Ketenagakerjaan?
2. Sejarah dibentuknya kategori pekerja BPU dan ?
3. Tujuan dibentuknya program jaminan sosial untuk tenagakerja BPU ?
4. Siapa sasaran pemasaran program jaminan sosial untuk tenagakerja BPU ?
5. Apa target yang ingin dicapai dari program jaminan sosial untuk tenagakerja BPU ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- /In.20/7.a/PP.00.9/02/2019
Lampiran : Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Misbahul Hasan
NIM : 083143188
Semester : X (10)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpn : 081339329115
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.
NIP : 19690706 200604 1 001
Judul Penelitian : Analisis Strategik Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Untuk Tenagakerja Bukan Penerima Upah (BPU)
(Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember)

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 26 Februari 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



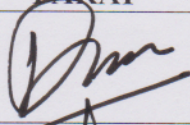
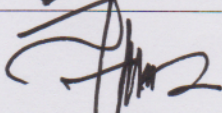
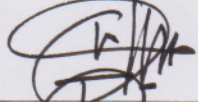
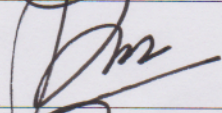
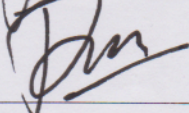
Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip

JURNAL KEGIATAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1.	28 Februari 2019	Silaturahmi dan memohon izin penelitian sekaligus memberikan surat izin penelitian	
2.	07 Maret 2019	Wawancara dengan Kabid pelayanan sekaligus meminta data yang diperlukan	
3.	08 Maret 2019	Wawancara bersama Kabid pemasaran dan meminta data yang di perlukan	
4.	08 Maret 2019	Wawancara bersama staf Kabid SDM serta berpamitan selesai penelitian	
5.	20 Maret 2019	Meminta surat selesai penelitian	

Jember, 20 Maret 2019
Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Jember



Dwi Endah Aprilistyani

SURAT KETERANGAN

Nomor: 397/III/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Endah Aprilistyani
Jabatan : Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Misbahul Hasan
NIM : 083 143 188
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Strategik Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) (Studi kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Maret 2019
Kepala BPJS Ketenagakerjaan
cabang Jember



BPJS
Ketenagakerjaan
JEMBER

Dwi Endah Aprilistyani

Capaian 2018 & Target 2019

Target 2019 : 34,5 Juta TK

Capaian Tahun 2018 Nasional

Aktif PU : 19.427.150 TK

Aktif BPU : 2.393.022 TK

Sektor Konstruksi : 8.639.900 TK

How About : JEMBER (upto Jan2019)

Aktif PU : 112.278 TK

Aktif BPU : 13.147 TK

Penduduk Jember yg Bekerja : 1.117.132 Jiwa



Target 2019 Jember:

Aktif PU : 124.947 TK (18.742 TK)

Aktif BPU : 27.379 TK (4.106 TK)

FOTO DOKUMENTASI



Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Jl. Letjen Sutoyo No. 54,
Kebonsari, Sumbersari, Jember



Wawancara bersama Staf Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Jember



Wawancara bersama Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember



Agenda sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk kelompok kerja tani, untuk menekan target peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

BIODATA PENULIS



Nama : Misbahul Hasan

Alamat : Dusun Sekar, RT/RW 007/003

Des. Sumberanyar, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo

Tempat, tanggal lahir : Probolinggo 13 Mei 1996

Jenis Kelamin : Laki - laki

Riwayat Pendidikan

- a. TK Sumberanyar 1 : 2000 - 2002
- b. SDN Sumberanyar 1 : 2002 - 2008
- c. SMP Islamiyah syafi'iyah : 2008 - 2011
- d. SMK Zainul Hasan Genggong : 2011 - 2014
- e. IAIN Jember : 2014 - 2019